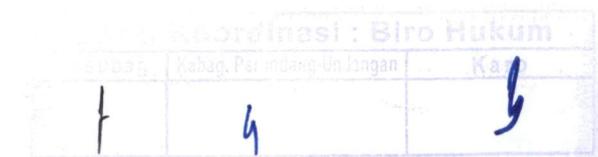


No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (1 02 05 1.01 01)	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas PMD, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Bappeda
		Melakukan peningkatan kapasitas komunikasi perubahan perilaku antar individu bagi Tenaga Pendamping di Desa (TPG, KPM, PLKB, Pendamping PKH) untuk meningkatkan kepatuhan penerima manfaat menjadi 90%	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (1 02 02 1.02 09)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	- Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;  - Prevalensi <i>Wasting</i> 7% (2024: RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas PMD, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Pendidikan, IDI, Pengusaha Apotik, Wartawan
			Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (1 02 02 1.02 27)	Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas PMD, Dinas Pangan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan Capil &KB, Dinas PPPA, Bappeda
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas PMD, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Bappeda

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (1 02 05 1.01 01)	serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (1 02 05 1.02 02)	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas PMD, Dinas Pangan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan Capil &KB, Dinas PPPA, Bappeda
			Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM (1 02 05 1.03 01)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Perindag, BPOM, DKP, Dinas PMD, Dinas Pertanian & Peternakan
			Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator (1 04 02 1.02 04)	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Orang		Dinas Perumahan, Permukiman & Pertanahan	Dinas PMD, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan Capil &KB, Dinas PPPA, Bappeda

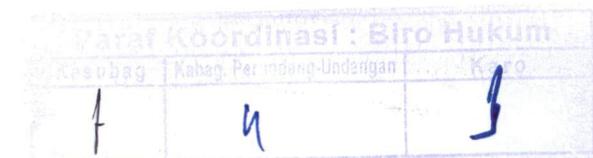


No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Melakukan kerjasama dengan influencer, tokoh masyarakat/ agama/politik/ selebgram lokal untuk kampanye perubahan perilaku	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (1 02 02 1.02 09)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prevalensi POU 5% (2024:RPJMN)</li> <li>Prevalensi Stunting 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;</li> <li>Persentase makanan yang memenuhi syarat 86% (2024:RPJMN)</li> </ul>	Dinas Kesehatan	Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Kependudukan Cakil & BK, Dinas PPPA

Paralel Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perindang-Un Jangan	Kapo
f	u	g



No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi (1 06 02 1.02 02)	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	(2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;	Dinas Sosial	Dinas PMD, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas PPPA, Bappeda
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (2 09 03 1.04 02)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	Persentase makanan yang memenuhi syarat (2024) 86%	Dinas Pangan	Dinas Kesehatan, Dinas Dinas Kominfo & Statistik, Dinas PPPA, Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Kependudukan Capil & KB
			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (2 16 02 1.01 02)	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen		Dinas Kominfo & Statistik	Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas PPPA, Dinas PMD, Bappeda



No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik (2 16 02 1.01 05)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen		Dinas Kominfo & Statistik	Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas PPPA, Dinas PMD, Bappeda
		Mengembangkan platform rujukan informasi bagi jurnalis dan media untuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi pangan B2SA	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (1 02 02 1.02 09)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	Konsumsi ikan 67,5 kg/kapita/tahun (2023); 68 kg/kapita/tahun (2024); 70 kg/kapita/tahun (2025); 72 kg/kapita/tahun (2026)	Dinas Kesehatan	Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Kependudukan Capil & BK, Dinas PPPA
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (2 09 03 1.04 02)		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	Konsumsi daging 14,6 kg/kapita/tahun (2024:RPJMN);	Dinas Pangan	Dinas Kesehatan, Dinas Dinas Kominfo & Statistik, Dinas PPPA, Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Kependudukan Capil & KB	
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (2.16.02.1.01.04)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	Konsumsi protein asal ternak 11 gram/kapita/tahun (2024:RPJMN); Konsumsi sayur	Dinas Kominfo & Statistik	Dinas PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, IDI, Pengusaha Kuliner, Wartawan, NGO	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum  
 Kesubag Kabag Perindang-Undangan Kro  
 f u b

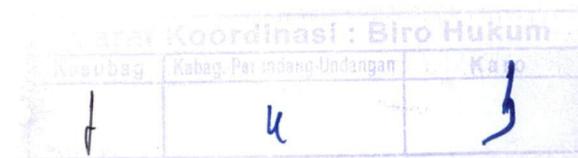
No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Pelayanan Informasi Publik (2 16 02 1.01 06)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	dan buah 316,3 gram/kapita/tahun (2024:RPJMN)	Dinas Kominfo & Statistik	Dinas PMD, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas PPPA, IDI, Pengusaha Kuliner, Wartawan, NGO
			Layanan Hubungan Media (2 16 02 1.01 07)	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan		Dinas Kominfo & Statistik	Dinas PMD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas PPPA, IDI, Pengusaha Kuliner, Wartawan, NGO
		Meningkatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dalam dalam pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (1 02 02 1.02 09)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	Prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun 21,8% (2024:RPJMN) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin	Dinas Kesehatan	BKSAUA, Kanwil kemenag, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Pangan, Dinas PMD, Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Kependudukan Capil & BK, Dinas PPPA
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat & Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (1 02 05 1.01 01)	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen		Dinas Kesehatan	BKSAUA, Kanwil kemenag, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Kependudukan Capil & BK, Dinas PPPA, Dinas PMD

Paraf Koordinasi : Biro Hukum  
 Kasubag | Kabag. Perundang-undangan | Kapo  
 f | k | j

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Melakukan orientasi <i>agent of change</i> pencegahan penyakit tidak menular (PTM)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (1 02 02 1.02 11)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	- Konsumsi sayur dan buah 316,3 gram/kapita/tahun (2024:RPJMN ); - Prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun 21,8% (2024:RPJMN ) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Dinas Kesehatan	Seluruh Perangkat Daerah dan stakeholders
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (1 02 02 1.02 19)		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	Dinas Kesehatan		Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA, Dinas Kominfo & Statistik, Bappeda Dinas PMD	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (1 02 03 1.01 01)		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	Dinas Kesehatan		Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA, , Dinas Kominfo & Statistik, Bappeda, Dinas PMD	
	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (1 02 03 1.01 02)		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	Orang	Dinas Kesehatan		Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA, Dinas Kominfo & Statistik, Bappeda, Dinas PMD	



No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (1 02 03 1.02 01)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang		Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA, Dinas Kominfo & Statistik, Bappeda, Dinas PMD
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (1 02 03 1.02 02)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Pangan, Dinas Sosial, IDI, Dinas PPPA, Wartawan, NGO
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik (2 16 02 1.01 10)	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang		Dinas Kominfo & Statistik	Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, IDI, Wartawan, NGO
			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas (2 16 03 1.02 09)	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen		Dinas Kominfo & Statistik	Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, IDI, Wartawan, NGO



No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Meningkatkan peran PKK dalam pendampingan keluarga untuk promosi aktivitas fisik, peningkatan konsumsi buah dan sayur, pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (1 02 02 1.01 24)	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	Konsumsi sayur dan buah 316,3 gram/kapita/tahun (2024:RPJMN)	Dinas Kesehatan	Dinas PPPA, Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Bappeda, Dinas PMD, Dinas Pendidikan
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (1 02 05 1.01 01)	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	Prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun 21,8% (2024:RPJMN)	Dinas Kesehatan	Dinas PPPA, Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Bappeda, Dinas PMD, Dinas Pendidikan
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (1 02 05 1.02 02)	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas PPPA, Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Bappeda, Dinas PMD, Dinas Pendidikan

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabeg. Perundang-undangan	Koro
f	h	h

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (2 08 04 1.01 01)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah		Dinas Kependudukan Capil & KB	Dinas PPPA, Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas PMD, Dinas Pendidikan
			Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi (2 08 04 1.01 03)	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Laporan		Dinas Kependudukan Capil & KB	Dinas PPPA, Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas PMD, Dinas Pendidikan
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (2 09 03 1.01 06)	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dokumen		Dinas Pangan	Dinas PPPA, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas PMD, Dinas Pendidikan
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim	Laporan		Dinas PMD	Dinas PPPA, Dinas Kependudukan Capil &

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kabag.	Kabag. Perundang-undangan	Koordinator
1	4	1

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (2 13 05 1.01 09)	Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				KB, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Pangan, Dinas Pendidikan
3.4	Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan;	Meningkatkan sosialisasi pentingnya pencantuman informasi kandungan kadar gula, garam, lemak (GGL) dalam produksi pangan olahan dan siap saji	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (1 02 02 1.02 09)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun 21,8% (2024:RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Dinas Kesehatan	Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Perindag, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pangan, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas PMD, Dinas PPPA
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (1 02 05 1.02 01)	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Perindag, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pangan, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas PMD, Dinas PPPA
		Meningkatkan Sosialisasi Keamanan dan Mutu Pangan Jajanan Anak Sekolah	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (1 01 02 1.01 46)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	- Persentase makanan memenuhi syarat 86% (2024:RPJMN);	Dinas Pendidikan	Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas PPPA, BPOM, Bappeda



No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (1 02 02 1.02 09)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Perindag, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pangan, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas PMD, Dinas PPPA
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (1 02 05 1.02 01)	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Perindag, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pangan, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas PMD, Dinas PPPA
3.5	Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu	Mengembangkan konsep isi piringku dengan pangan lokal di kab/kota	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (1 01 02 1.01 46)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	Skor PPH 94,5 (2023), 94,7 (2024), 95 (2025), 95 (2026); Konsumsi ikan 67,5 kg/kapita/tahun (2023); 68 kg/kapita/tahun (2024); 70 kg/kapita/tahun (2025); 72	Dinas Pendidikan	Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PMD, Bappeda
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (1 02 02 1.02 06)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PMD, Bappeda



No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan;		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota (1 02 02 1.02 18)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	kg/kapita/tahun (2026) Konsumsi daging 14,6 kg/kapita/tahun (2024:RPJMN);	Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PMD, Bappeda
Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (1 02 05 1.01 01)			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	Konsumsi protein asal ternak 11 gram/kapita/tahun (2024:RPJMN); Konsumsi sayur dan buah 316,3 gram/kapita/tahun (2024:RPJMN)	Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PMD, Bappeda	
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (2 09 03 1.01 02)			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan		Dinas Pangan	Dinas Pertanian & Peternakan, DKP, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PMD, Bappeda	

Koordinasi : Biro Hukum  
 Kabag. Perundang-undangan  
 Kro

f 4

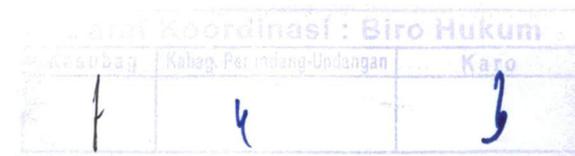
No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (2 09 03 1.01 06)	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dokumen		Dinas Pangan	Dinas Pertanian & Peternakan, DKP, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PMD, Bappeda
			Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (2 09 03 1.04 01)	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen		Dinas Pangan	DKP, Dinas Pertanian & Peternakan, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Disperindag, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PMD
		Mengembangkan peta jalan diversifikasi pangan untuk peningkatan konsumsi sayur, buah, dan protein hewani	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan (2 09 02 1.01 05)	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Dokumen		Dinas Pangan	Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Bappeda, BULOG, BPOM
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan		Dinas Pangan	Bappeda, Dinas Pertanian & Peternakan, DKP, Dinas Pendidikan, Dinas PMD, Dinas Pariwisata, Dinas PPPA, Disperindag, Dinas

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Biro
f	u	3

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Lainnya (2 09 03 1.01 03)					Kependudukan Capil & KB, Dinas Sosial
3.6	Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis pangan lokal;	Membina kabupaten/kota untuk menetapkan regulasi mengenai ASI Eksklusif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (1 02 02 1.02 03)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;  Prevalensi <i>Wasting</i> 7% (2024) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PMD, Bappeda
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (1 02 02 1.02 06)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PMD, Bappeda
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota (1 02 02 1.02 18)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PMD, Bappeda



No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) (2 14 04 1.01 09)	Tersedianya Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	Dokumen		Dinas Kependudukan Capil & KB	Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas PMD, Bappeda
			Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK (2 14 04 1.01 14)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Dokumen		Dinas Kependudukan Capil & KB	Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas PMD, Bappeda
			Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK (2 14 04 1.01 15)	Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Unit		Dinas Kependudukan Capil & KB	Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas PMD, Bappeda

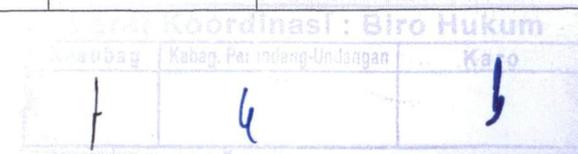


No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Meningkatkan aksesibilitas terhadap makanan tambahan berbahan dasar pangan lokal	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (1 02 02 1.01 21)	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;	Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PMD, Bappeda
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (1 02 02 1.01 22)		Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Paket	Prevalensi <i>Wasting</i> 7% (2024) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PMD, Bappeda	
	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (2 09 03 1.04 01)		Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen	Dinas Pangan	Bappeda, Dinas Pertanian & Peternakan, DKP, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Disperindag, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PMD		
3.7	Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat	Mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (1 02 02 1.02 06)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah	Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		suplementasi gizi (makanan tambahan, TTD, dan kapsul vit. A) untuk mencapai cakupan target sasaran sebesar 90 % pada tahun 2026	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota (1 02 02 1.02 18)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	berdasarkan jenis kelamin;  Prevalensi <i>Wasting</i> 7% (2024:RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (1 02 05 1.01 01)	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag. Perundang-undangan	Kan
f	4	6

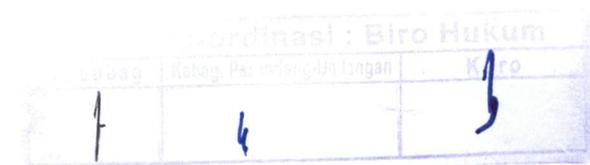
No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Mendorong pemanfaatan pemanfaatan RUTF ( <i>Ready to Use Therapeutic Food</i> ) berbahan dasar pangan lokal produksi dalam negeri dalam pelayanan gizi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (1 02 02 1.02 06)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin; Prevalensi <i>Wasting</i> 7% (2024:RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda, BPOM
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (1 02 05 1.01 01)	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda, BPOM
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) dan Masyarakat Hukum Adat yang	Lembaga		Dinas PMD



No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (2 13 05 1.01 03)	Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya				
		Meningkatkan sasaran pemberian bubuk tabur gizi kepada anak umur 6-59 bulan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (1 02 02 1.02 06)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;	Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda, BPOM
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (1 02 05 1.01 01)	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	Prevalensi <i>Wasting</i> 7% (2024:RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda, BPOM

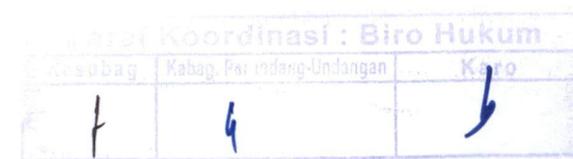
Biro Koordinasi : Biro Hukum		
Subag	Kabag. Perimbangan-Undangan	Karo
f	u	b

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (2 13 05 1.01 03)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Lembaga		Dinas PMD	Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Perindag, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pangan, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PPPA
		Memperluas implementasi pemberian bubuk tabur gizi kepada anak umur 6-24 bulan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (1 02 02 1.02 06)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	Prevalensi Stunting 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan	Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda, BPOM





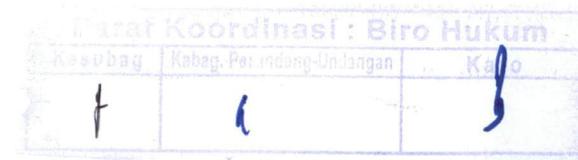
No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Meningkatkan tata kelola pelayanan gizi pada situasi darurat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (1 02 02 1.02 01)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	- Prevalensi POU 5% (2024:RPJMN); - Prevalensi FIES 4% (2024:RPJMN); - Prevalensi Wasting 7% (2024:RPJMN)	Dinas Kesehatan	BPBD, Dinas PMD, Dinas Pangan, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas PPPA
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (1 02 02 1.02 06)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	- disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda, BPOM
		Meningkatkan kapasitas puskesmas dalam melaksanakan pelayanan terpadu (Pandu) PTM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (1 02 02 1.02 11)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	Prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun 21,8% (2024:RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Dinas Kesehatan	Dinas Dikbud, Dinas PP dan PA



No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam Gerakan Lawan Obesitas dan pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) di desa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (1 02 02 1.02 06)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	Prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun 21,8% (2024:RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda, BPOM
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (1 02 05 1.01 01)	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	Prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun 21,8% (2024:RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda, BPOM

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag. Perindang-Undangan	Kro
↑	↓	↓

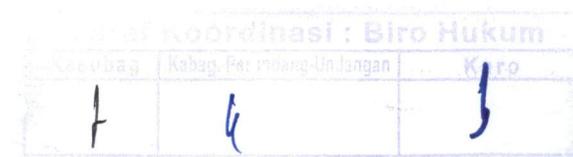
No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (2 13 05 1.01 02)	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	Prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun 21,8% (2024:RPJMN) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Dinas PMD	Dinas Pangan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (2 13 05 1.01 03)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Lembaga		Dinas PMD	Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Perindag, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pangan, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PPPA



No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Mengintegrasikan pengendalian dampak COVID-19 terhadap pedoman yang berkaitan dengan perbaikan gizi yang diterbitkan pemerintah pusat yang digunakan di daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (1 02 02 1.02 01)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;	Dinas Kesehatan	BPBD, Dinas PMD, Dinas Pangan, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas PPPA
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (1 02 02 1.02 06)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Perindag, Dinas Naker, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA, BPOM, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda,
		Memberikan perlindungan gizi kepada pekerja perempuan (sektor swasta) terdampak	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (1 02 02 1.02 06)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah	Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Perindag, Dinas Naker, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA, BPOM, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda,

Koridor Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag. Perindag-Untangan	Kepo
d	a	b

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		pandemi COVID-19	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi (2 08 02 1.01 03)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	Pengakut Daerah	berdasarkan jenis kelamin;	Dinas PPPA	Dinas Pendidikan, Dinas Naker, Dinas Pangan, Dinas Perindag, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda, BPOM
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi (2 08 03 1.01 02)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Perangka t Daerah		Dinas PPPA	Dinas Pendidikan, Dinas Naker, Dinas Pangan, Dinas Perindag, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda, BPOM



No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi (2 08 03 1.03 03)	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang		Dinas PPPA	Dinas Pendidikan, Dinas Naker, Dinas Pangan, Dinas Perindag, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda, BPOM
3.8	Pengendalian pemborosan pangan ( <i>food waste</i> );	Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi <i>food waste</i>	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi (2.11.08.1.01.03)	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	Orang	Prevalensi POU 5% (2024:RPJMN);	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Perindag, Dinas Kominfo
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (2.11.08.1.01.04)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Keluarga		Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Perindag, Dinas Kominfo

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag. Perindag-Untangan	Kabo
1	1	1

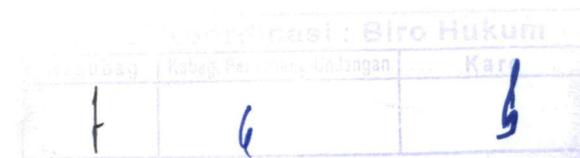
No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Mengembangkan sistem jual beli atau jaringan pasar produk pangan <i>imperfect</i>	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan (3 30 07 1.03 03)	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen	Prevalensi POU 5% (2024:RPJMN);	Dinas Perindag	Dinas Pertanian, Dinas Koperasi & UKM, Dinas Energi & SDM, Dinas Perhubungan
		Melakukan kerjasama kesepahaman ( <i>MoU</i> ) dengan industri pangan dan perhotelan untuk mengendalikan <i>food waste</i>	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata (3.26.02.1.04.04)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan	Prevalensi POU 5% (2024:RPJMN);	Dinas Pariwisata	Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Perindag, Dinas Pertanian dan Peternakan, DKP, BPOM, Dinas Koporas & UKM, Dinas Energi & SDM, BULOG
		Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan <i>food waste</i>	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri (3 26 03 1.01 03)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	Prevalensi POU 5% (2024:RPJMN);	Dinas Pariwisata	Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Perindag, Dinas Pertanian dan Peternakan, DKP, BPOM, Dinas Koporas & UKM, Dinas Energi & SDM, BULOG

Paralel Koordinasi : Biro Hukum		
Kab. Perindag	Kabag. Perindag-Disjangan	Ka
f	u	5

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.9	Penambahan jenis dan komposisi zat gizi (fortifikasi) pada pangan tertentu sebagai pengayaan nilai gizi	Menyusun peta jalan fortifikasi pangan di Sulawesi Utara untuk perbaikan kebijakan yang ada	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (2 09 02 1.01 04)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi 100% (2024:RPJMN);  Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;	Dinas Pangan	Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindag, BPOM, Bappeda, Dinas Energi & SDM
			Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan (2 09 02 1.01 05)	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Dokumen		Dinas Pangan	Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindag, BPOM, Bappeda, Dinas Energi & SDM
		Mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha untuk memproduksi fortifikan dan kernel fortifikasi	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (3 31 02 1.01 01)	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen		Dinas Perindag	Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pangan, Dinas PU, Bappeda

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perindag-Undangan	Kiro
f	e	3

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Melaksanakan Pengawasan terpadu lintas OPD dalam pengawasan dan pembinaan implementasi pangan fortifikasi	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (3 31 02 1.01 06)	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen		Dinas Perindag	Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pangan, Dinas PU, Bappeda
		Melaksanakan pengawasan implementasi aturan pangan berfortifikasi sesuai SNI terkini yang berlaku	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi (2 09 05 1.01 01)	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	Dokumen	Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026)	Dinas Pangan	Disperindag, BPOM, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Bappeda
				Jumlah produsen minyak goreng sawit yang dibina dan diawasi dalam rangka pengimplementasian produksi minyak goreng sawit yang mengandung vitamin A atau provitamin A sesuai SNI terkini yang berlaku (2021)	Tahun 2022: semua produsen minyak goreng skala besar termasuk <i>repacker</i>	(2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;	Dinas Perindag	BPOM



No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.10	Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan.	Mendorong ditetapkannya minuman berpemanis dalam kemasan sebagai barang kena cukai baru		Jumlah produsen tepung terigu yang dibina dan diawasi dalam rangka pengimplementasian produksi tepung terigu berfortifikasi sesuai SNI terkini yang berlaku (2021)	Tahun 2022: semua produsen tepung terigu skala besar termasuk <i>repacker</i>	Prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun 21,8% (2024:RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Dinas Perindag	BPOM, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Bappeda
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota (5 02 02 1.02 01)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Laporan		Badan Pendapatan Daerah	Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Pangan, BPOM, Dinas Perindag
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan		Dinas Pangan	Dinas Kesehatan, BPOM, Dinas Perindag

Staf Koordinasi : Biro Hukum  
 Kasubbag / Kabag. Perindag-Undangan / Biro

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Mendorong ekstensifikasi pilihan lebih sehat"/healthy choice pangan siap saji	Promosi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Lokal	<p>Persentase makanan memenuhi syarat 86% (2024:RPJMN)</p> <p>Prevalensi obesitas pada penduduk &gt;18 tahun 21,8% (2024:RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin</p>	Dinas Pangan	BPOM, Dinas Perindag, Bappeda



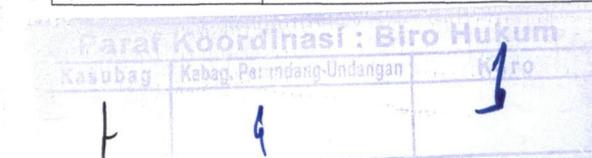
No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Tujuan Strategis 4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi</b>								
4.1	Penguatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat, provinsi dan kabupaten/kota	Membentuk forum koordinasi lintas sektor/ pemangku kepentingan di provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev yang terintegrasi dengan forum koordinasi percepatan penurunan <i>stunting</i>	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (5 01 03 1.01 06)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skor PPH 94,5 (2023), 94,7 (2024), 95 (2025), 95 (2026);</li> <li>Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;</li> <li>Prevalensi <i>Wasting</i> 7% (2024:RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin</li> </ul>	Bappeda	Perangkat Daerah yang terlibat dalam Forum Koordinasi Penurunan <i>Stunting</i>



No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (5 01 03 1.01 07)	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah		Bappeda	Perangkat Daerah yang terlibat dalam Forum Koordinasi Penurunan Stunting

Koordinasi : Biro Hukum		
Kabag. Hukum	Kabag. Perencanaan/Undangan	Kepo
f	a	↓

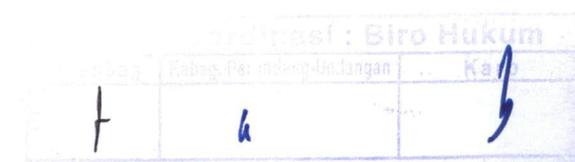
No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Mengintegrasikan RAD-PG di dalam pelaksanaan aksi konvergensi penurunan <i>stunting</i> (aksi #2)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (5 01 03 1.01 06)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;	Bappeda	Dinas Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kesehatan
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya (5 01 02 1.01 02)	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen		Bappeda	Dinas Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kesehatan
		Memperkuat peran Bappeda dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RADPG di	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	Skor PPH 94,5 (2023), 94,7 (2024), 95 (2025), 95 (2026);	Bappeda	Dinas Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kesehatan



No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Kabupaten/Kota	Daerah Bidang SDA (5 01 03 1.02 08)	Jumlah Kab/Kota mendapatkan pendampingan dalam penyusunan RAD-PG sesuai pedoman terkini	Tahun 2024: 15 Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;</li> <li>- Prevalensi <i>Wasting</i> 7% (2024:RPJMN) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin</li> </ul>	Bappeda	Dinas Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kesehatan
4.2	Penguatan peran sektor nonpemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi di provinsi dan kab/kota	Meningkatkan koordinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah) dalam <i>scaling up</i> program pangan dan gizi di	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi (2 12 04 1.02 04)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skor PPH 94,5 (2023), 94,7 (2024), 95 (2025), 95 (2026);</li> <li>- Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14%</li> </ul>	Dinas Kependudukan Capil & KB	Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Bappeda

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kabubag	Kabag. Perundang-Undangan	Kab.
f		b

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		provinsi dan kab/kota	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (5 01 03 1.01 06)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	(2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;  - Prevalensi Wasting 7% (2024:RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Bappeda	
			Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan (2 16 02 1.01 08)	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen		Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik	Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Bappeda
			Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan (2 09 02 1.01 05)	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Dokumen		Dinas Pangan	Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas PPPA, Bappeda



No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Melibatkan sektor swasta, industri dan perdagangan pangan untuk aktif melakukan kegiatan komunikasi perubahan perilaku konsumsi masyarakat, <i>food loss</i> dan <i>food waste</i> .	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (1 02 05 1.02 01)	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	<p>Skor PPH 94,5 (2023), 94,7 (2024), 95 (2025), 95 (2026);</p> <p>- AKE 2.400 kkal/kapita/hari (2023-2026);</p> <p>- AKP 63 gram/kapita/hari (2023-2026);</p> <p>- Konsumsi ikan 67,5 kg/kapita/tahun (2023); 68 kg/kapita/tahun (2024); 70 kg/kapita/tahun (2025); 72 kg/kapita/tahun (2026)</p> <p>- Konsumsi daging 14,6</p>	Dinas Kesehatan	Bappeda, Dinas Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perindang-Undangan	Kiro
4	6	9

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Dokumen	kg/kapita/tahun (2024: RPJMN); - Konsumsi protein asal ternak 11 gram/kapita/tahun (2024: RPJMN); - Konsumsi sayur dan buah 316,3 gram/kapita/tahun (2024: RPJMN); - Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;	Dinas Pangan	Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kesehatan, Dinas P3A, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Kiro
f	i	h

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.3	Penguatan dimensi gender dan peran perempuan dalam kelembagaan pangan dan gizi	Melakukan peningkatan kapasitas PUG dan PURG di institusi terkait pembangunan pangan dan gizi di provinsi dan kab/kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi (2 08 02 1.01 01)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	Dokumen	- Skor PPH 94,5 (2023), 94,7 (2024), 95 (2025), 95 (2026); - Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;	Dinas PPPA	Bappenas, Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Bappeda
			Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi (2 08 02 1.01 04)	Jumlah D/B/Biro bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga yang meningkat kapasitas PUG/PPRG-nya	Tahun 2023: 21 D/B/Biro yang terlibat dalam RAD PG Tahun 2024: 34	- Prevalensi <i>Wasting</i> 7% (2024:RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Dinas PPPA	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas Sosial, Bappeda

Paraf Koordinasi : Biro Hukum

Kesubag	Kabag. Perundang-undangan	Biro
f	f	f

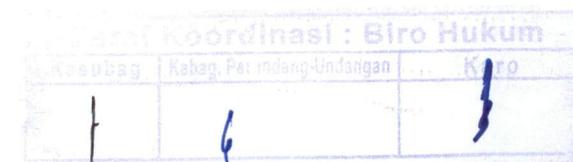
No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi (2 08 02 1.03 01)	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skor PPH 94,5 (2023), 94,7 (2024), 95 (2025), 95 (2026);</li> <li>- Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;</li> <li>- Prevalensi <i>Wasting</i> 7% (2024: RPJMN)</li> <li>- disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin</li> </ul>	Dinas PPPA	Dinas PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan

Paralel Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag. Perencanaan/Undangan	Biro
f	a	3

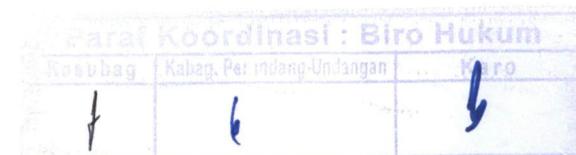
No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Jumlah kab/kota yang memberikan penguatan kapasitas terhadap lembaga masyarakat terkait PUG dan PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak)	Tahun 2024: 15 kab/kota			
		Peningkatan peran perempuan dalam implementasi pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak, peningkatan aktifitas fisik dan deteksi dini	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi (2 08 02 1.03 02)	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas hidup sehat untuk mengendalikan obesitas dan PTM	Orang	Prevalensi Obesitas pada penduduk >18 tahun 21,8% (2024:RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Dinas PPPA	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas Pangan, Dinas PMD, Dinas Sosial
		Mengembangkan mekanisme pengawasan sosial oleh organisasi perempuan, masyarakat dan media terhadap kebijakan ASI Eksklusif, susu	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi (2 08 02 1.03 03)	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	Dokumen	Skor PPH 94,5 (2023), 94,7 (2024), 95 (2025), 95 (2026); Prevalensi Stunting 15% (2023), 14% (2024), 13%	Dinas PPPA	Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PMD, Dinas Sosial

Paraf Koordinasi : Biro Hukum  
 Kesubag Kabag. Perundang-Undangan Kiro  
 f e b

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		formula, dan produk bayi lainnya yang berlaku				(2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;  Prevalensi Wasting 7% (2024:RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin		
4.4	Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi	Mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan (5 05 02 1.01 13)	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Rekomendasi	Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 100%;	Badan Litbang	Dinas Pangan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, BPN/ATR, Dinas PMD, Bappeda
			Perencanaan Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	Luas lahan Produksi beras biofortifikasi 200.000 ha;		



No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang (1 03 12 1.01 03)	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	Dokumen	- Ketersediaan cadangan pangan 275 ton per tahun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, BPN/ATR, Dinas PMD
		Menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan produk inovasi pangan yang layak (memenuhi persyaratan gizi, keamanan, acceptibilitas, harga, shelf live) untuk diadopsi ke dalam pelayanan gizi	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Darah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	- Prevalensi POU 5% (2024: RPJMN); - Prevalensi FIES 4% (2024: RPJMN) - Skor PPH 94,5 (2023), 94,7 (2024), 95 (2025), 95 (2026)	Dinas Pangan	Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, KKP, BPOM, Badan Litbang
4.5	Pengembangan platform penelitian dan pengembangan di bidang pangan dan gizi	Meningkatkan penelitian dan pengembangan untuk pencegahan dan penanganan food loss dan food waste termasuk	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (5 05 02 1.04 01)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	- Prevalensi POU 5% (2024: RPJMN); - Prevalensi FIES 4% (2024: RPJMN)	Badan Litbang	Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Peternakan, DKP, BPOM



No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		inovasi <i>smart farming</i>						
		Melakukan kerjasama dengan influencer, tokoh masyarakat/ agama/politik/ selebgram lokal untuk kampanye perubahan perilaku	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (1 02 02 1.02 09)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prevalensi POU 5% (2024:RPJMN)</li> <li>Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), &gt; 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;</li> <li>Persentase makanan yang memenuhi syarat 86% (2024:RPJMN)</li> </ul>	Dinas Kesehatan	Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Kependudukan Capil & BK, Dinas PPPA

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag. Perundang-Undangan	Kap
f	k	g

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Melakukan kajian <i>gap analysis</i> program pengendalian defisiensi zat gizi mikro di Sulawesi Utara	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (5 05 02 1.02 06)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;</li> <li>Prevalensi <i>Wasting</i> 9% (2024: RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;</li> </ul>	Badan Litbang	Dinas Kesehatan, BPOM, Dinas Pangan

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kabubg	Kabag. Perindag-Un.Jangan	Kepo
f	u	3

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Menyusun kajian yang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan pemberian suplementasi multi gizi mikro	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (5 05 02 1.02 06)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	- Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin; - Prevalensi <i>Wasting</i> 9% (2024:RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;	Badan Litbang	Bappeda, Dinas Kesehatan, BPOM, Dinas Pangan

Parat Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag. Perundang-undangan	Karo
1	4	3

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Mengembangkan <i>community based data</i> untuk pemetaan dan evaluasi masalah gizi mikro di tingkat kabupaten/kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (1 02 02 1.02 06)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;  Prevalensi <i>Wasting</i> 9% (2024: RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;	Dinas Kesehatan	Bappeda, BPS
		Mengembangkan biofortifikasi dan fortifikasi di berbagai komoditi pangan	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (5 05 02 1.04 01)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;	Badan Litbang	Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, DKP, Dinas Infokom & Statistik

Paraf Koordinasi : Biro Hukum  
 Kesubag | Kabag. Perundang-undangan | Kalo  
 f | e | b

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						- Prevalensi Wasting 9% (2024: RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;		
		Menyelenggarakan forum daerah penelitian dan pengembangan pangan dan gizi secara berkala	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (5 05 02 1.03 05)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	Jumlah hasil riset kemaritiman, kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan sebanyak 15 hasil riset (2024);	Badan Litbang	Bappeda, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan,
			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (5 05 02 1.03 04)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	- Teknologi yang diterapkan oleh petani 80-95% (2024: RPJMN)	Badan Litbang	Bappeda, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Peternakan
		Menembangkan inovasi pemanfaatan pangan lokal untuk perbaikan	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian,	Dokumen	Prevalensi Stunting 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12%	Badan Litbang	Bappeda, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, DKP, Dinas Pertanian dan Peternakan

Paraf Koordinasi : Biro Hukum  
 Kasubag. Kabag. Perundang-Undangan ... Kaso

f 4 5

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		konsumsi gizi keluarga	dan Inovasi (5 05 02 1.04 01)	Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		(2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin; Prevalensi <i>Wasting</i> 9% (2024:RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;		
		Melakukan kajian literasi gizi untuk mendukung kebijakan perubahan perilaku makan B2SA yang juga memuat pemetaan promosi perubahan perilaku cegah <i>stunting</i> yang sudah beredar	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (2 09 03 1.04 02)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	- Konsumsi ikan 67,5 kg/kapita/tahun (2023); 68 kg/kapita/tahun (2024); 70 kg/kapita/tahun (2025); 72 kg/kapita/tahun (2026) - Konsumsi daging 14,6 kg/kapita/tahun (2024); - Konsumsi protein asal	Dinas Pangan	Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Bappeda, Balitbang

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						ternak 11 gram/kapita/tahun (2024); - Konsumsi sayur dan buah 316,3 gram/kapita/tahun (2024);		
		Mengembangkan jejaring laboratorium bidang pangan dan gizi untuk pembaharuan Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI)/Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) sesuai kondisi Indonesia	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (209 05 1.01 03)	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	- Skor PPH 95,2% (2024); - AKE 2.400 kal/kapita/hari (2023-2026); - AKP 63 gram/kapita/hari (2023-2026);	Dinas Pangan	Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, BPOM, Bappeda

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesdag	Kabag. Perundang-undangan	Kro
h	u	3

## BAB VIII MATRIKS DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN NON PEMERINTAH

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Tujuan Strategis yang disasar	Nama Kegiatan TJSL	Output Kegiatan TJSL	Satuan Output	Target Output 2022	Target Output 2023	Target Output 2024	Target Output 2025	Target Output 2026	Indikatif alokasi anggaran untuk 5 Tahun (2022 s.d. 2026) dalam Rp.	Sumber Pendanaan	Lokasi
1	CARGILL INDONESIA	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Budidaya Jamur Tiram Putih dengan Media sabut kelapa	Pelatihan bagi kelompok perempuan	Orang	Produksi jamur Tiram putih 50kgper hari	- Training peningkatan kualitas jamur tiram putih, - Pelatihan pembuatan produk turunan jamur	Sertifikasi Halal dan BPOM	Exit Program	-	1.038.075.000	CSR PT. Cargill Indonesia	Sulawesi Utara
2	CARGILL INDONESIA	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Program Produksi Minyak Kelapa Yang Berkelanjutan	Memberikan peningkatan ekonomi petani melalui peningkatan produktifitas dan praktek pertanian yang berkelanjutan	Orang	200 petani dapat tersertifikasi	Penambahan Jumlah petani yang tersertifikasi	Penambahan jumlah petani yang tersertifikasi	Penambahan jumlah petani yang tersertifikasi	-	1.653.286.725	CSR PT. Cargill Indonesia	Sulawesi Utara
3	PT. BANK SULUTGO	Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman)	Pembangunan watertower di universitas klabat	Volume air	Liter	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	750.000.000	TJS BSG	Sulawesi Utara



No	Nama Lembaga /Perusahaan	Tujuan Strategis yang disasar	Nama Kegiatan TJSL	Output Kegiatan TJSL	Satuan Output	Target Output 2022	Target Output 2023	Target Output 2024	Target Output 2025	Target Output 2026	Indikatif alokasi anggaran untuk 5 Tahun (2022 s.d. 2026) dalam Rp.	Sumber Pendanaan	Lokasi
4	BANK BRI WILAYAH MANADO	Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)	BRI Peduli Woman Communi-Tree Chapter II	Pupuk	Benih Bunga	-	-	-	-	-	-	Kantor Pusat	Sulawesi Utara
5	PT. PEGADAIAN (PERSERO) KANWIL MANADO	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Pegadaian Green Live Action	Bibit	Buah	Pembangunam infrastruktur untuk fasilitas umum	-	Pengembangan Tempat Usaha dengan program kemitraan	Program Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	Pemberdayaan Mahasiswa Berprestasi untuk mendapatkan pelatihan	7.000.000.000	Pegadaian Pusat	Sulawesi Utara
6	PT. BANK SULUTGO	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Pembangunan Water Tower Universitas Klabat	Air Bersih	Liter	40.000 liter	60.000 liter	60.000 liter	80.000 liter	80.000 liter	-	CSR Perusahaan	Sulawesi Utara
7	YAPEKA SULAWESI UTARA	Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi	Penyusunan dan pengesahan peraturan desa tentang pengelolaan sumber daya perikanan gurita tersusun dan tersahkan	Peraturan desa tentang pengelolaan sumber daya perikanan gurita tersusun dan tersahkan	Dokumen	Pengesahan peraturan desa tentang pengelolaan sumber daya perikanan gurita	-	-	-	-	87.000.000	Blue Ventures	Sulawesi Utara

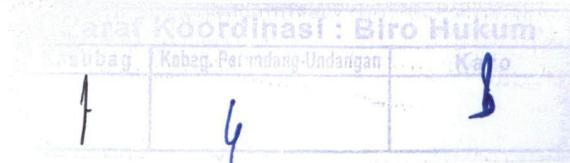
Koordinasi : Biro Hukum

Kesubag	Kabag. Perundang-Undangan	Kapo
f	4	3

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Tujuan Strategis yang disasar	Nama Kegiatan TJSL	Output Kegiatan TJSL	Satuan Output	Target Output 2022	Target Output 2023	Target Output 2024	Target Output 2025	Target Output 2026	Indikatif alokasi anggaran untuk 5 Tahun (2022 s.d. 2026) dalam Rp.	Sumber Pendanaan	Lokasi
8	YAPEKA SULAWESI UTARA	Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi	Pengintegrasian rencana pengembangan sumber daya perikanan gurita dengan RPJMDesa	Rencana pengembangan sumber daya perikanan gurita terintegrasikan dengan RPJMDesa	Dokumen	Pelatihan tim penyusun RPJMDesa	- Penyusunan draft RPJMDesa - Pengesahan draft RPJMDesa	-	-	-	135.000.000	Blue Ventures	Sulawesi Utara
9	YAPEKA SULAWESI UTARA	Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)	Dimulainya atau diperluasnya penutupan sementara perikanan gurita	Penutupan sementara perikanan gurita dimulai atau diperluas	Siklus penutupan sementara perikanan gurita	- Desa Bulutui melakukan 2 siklus penutupan sementara perikanan gurita - Desa Gangga Satu melakukan 2 siklus penutupan sementara perikanan gurita - Desa Likupang Dua melakukan 1 siklus penutupan sementara perikanan gurita	- Desa Bulutui melakukan 1 siklus penutupan sementara perikanan gurita - Desa Gangga Satu melakukan 1 siklus penutupan sementara perikanan gurita - Desa Likupang Dua melakukan 1 siklus penutupan sementara perikanan gurita	-	-	-	84.000.000	Blue Ventures	Sulawesi Utara
10	YAPEKA SULAWESI UTARA	Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi	Pembentukan kelompok pengelola Rumah Boboca (Temporary Closure - TC)	Kelompok pengelola Rumah Boboca (Temporary Closure - TC) terbentuk	Kelompok pengelola Rumah Boboca (Temporary Closure - TC)	Kelompok Batu Woka Sejahtera terbentuk di Desa Likupang Dua	-	-	-	-	96.000.000	Blue Ventures	Sulawesi Utara



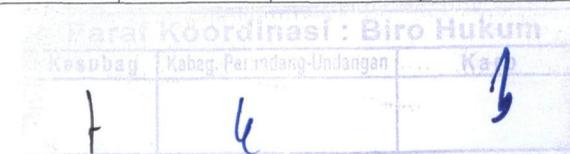
No	Nama Lembaga /Perusahaan	Tujuan Strategis yang disasar	Nama Kegiatan TJSL	Output Kegiatan TJSL	Satuan Output	Target Output 2022	Target Output 2023	Target Output 2024	Target Output 2025	Target Output 2026	Indikatif alokasi anggaran untuk 5 Tahun (2022 s.d. 2026) dalam Rp.	Sumber Pendanaan	Lokasi
11	YAPEKA SULAWESI UTARA	Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi	Pengembangan sistem pengelolaan Rumah Boboca	Sistem pengelolaan Rumah Boboca yang dapat diimplementasikan di Desa Bulutui, Gangga Satu, dan Likupang Dua	Sistem pengelolaan Rumah Boboca	Pelatihan sistem pengelolaan Rumah Boboca untuk kelompok Napo Ila Indah, Sawang Indah, dan Batu Woka Sejahtera	Pelatihan sistem pengelolaan Rumah Boboca untuk kelompok Napo Ila Indah, Sawang Indah, dan Batu Woka Sejahtera	-	-	-	60.000.000	Blue Ventures	Sulawesi Utara
12	YAPEKA SULAWESI UTARA	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Pengambilan data perikanan gurita partisipatif	Data perikanan gurita terambil secara partisipatif	Pengumpul gurita di tingkat desa	- Desa Bulutui melakukan pengambilan data perikanan gurita partisipatif - Desa Gangga Satu melakukan pengambilan data perikanan gurita partisipatif - Desa Likupang Dua melakukan pengambilan data perikanan gurita partisipatif	- Desa Bulutui melakukan pengambilan data perikanan gurita partisipatif - Desa Gangga Satu melakukan pengambilan data perikanan gurita partisipatif - Desa Likupang Dua melakukan pengambilan data perikanan gurita partisipatif	-	-	-	472.500.000	Blue Ventures	Sulawesi Utara
13	YAPEKA SULAWESI UTARA	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi	Pengembangan unit usaha kelompok pengelola Rumah Boboca	Kelompok pengelola Rumah Boboca ( <i>temporary closure</i> ) memulai unit	Unit usaha kelompok pengelola Rumah	Kelompok simpan di Bulutui, Gangga Satu, dan Likupang Dua mendapatkan pelatihan mengenai	Kelompok simpan di Bulutui, Gangga Satu, dan Likupang Dua mendapatkan	-	-	-	292.500.000	Blue Ventures	Sulawesi Utara



No	Nama Lembaga /Perusahaan	Tujuan Strategis yang disasar	Nama Kegiatan TJSL	Output Kegiatan TJSL	Satuan Output	Target Output 2022	Target Output 2023	Target Output 2024	Target Output 2025	Target Output 2026	Indikatif alokasi anggaran untuk 5 Tahun (2022 s.d. 2026) dalam Rp.	Sumber Pendanaan	Lokasi
		Seimbang dan Aman	(temporary closure)	usahanya sendiri	Boboca (temporary closure)	pengolahan hasil perikanan gurita	pelatihan mengenai pengolahan hasil perikanan gurita						
14	YAPEKA SULAWESI UTARA	Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi	Kajian kebijakan perikanan untuk mendukung penyuaaraan dan integrasi gurita sebagai unggulan	Adanya dokumen kajian kebijakan perikanan gurita	Dokumen kajian	Draft awal kajian kebijakan perikanan gurita	Draft akhir kajian kebijakan perikanan gurita	-	-	-	25.500.000	Blue Ventures	Sulawesi Utara
15	BANK BRI WILAYAH MANADO	Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Pemberian Bantuan Sound System GMIM Pasino'owan Koreng Wilayah Tareran 1	Sound System	Sound System	Pemberian informasi yang berhubungan dengan pangan dan gizi	Pemberian informasi yang berhubungan dengan pangan dan gizi	Pemberian informasi yang berhubungan dengan pangan dan gizi	Pemberian informasi yang berhubungan dengan pangan dan gizi	Pemberian informasi yang berhubungan dengan pangan dan gizi	-	Kantor Pusat	Sulawesi Utara
16	BANK BRI WILAYAH MANADO	Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Pemberian Bantuan Sound System GMIM Tiberias Kiniar	Sound System	Sound System	Pemberian informasi yang berhubungan dengan pangan dan gizi	Pemberian informasi yang berhubungan dengan pangan dan gizi	Pemberian informasi yang berhubungan dengan pangan dan gizi	Pemberian informasi yang berhubungan dengan pangan dan gizi	Pemberian informasi yang berhubungan dengan pangan dan gizi	-	Kantor Pusat	Sulawesi Utara
17	YAYASAN BUMI TANGGUH (YBT)	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Fasilitasi penetapan kawasan konservasi laut daerah	Peta penetapan kawasan konservasi laut daerah	Kawasan /de sa	Lanjutan pendampingan masyarakat desa lokasi kawasan konservasi laut daerah dan penguatan Pokmaswas	-	Lanjutan pendampingan masyarakat desa lokasi kawasan konservasi laut daerah	Lanjutan pendampingan masyarakat desa lokasi kawasan konservasi laut daerah	Lanjutan pendampingan masyarakat desa lokasi kawasan konservasi laut daerah	250.000.000	WCS dan sumber lain yang tidak mengikat	Sulawesi Utara

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Tujuan Strategis yang disasar	Nama Kegiatan TJSL	Output Kegiatan TJSL	Satuan Output	Target Output 2022	Target Output 2023	Target Output 2024	Target Output 2025	Target Output 2026	Indikatif alokasi anggaran untuk 5 Tahun (2022 s.d. 2026) dalam Rp.	Sumber Pendanaan	Lokasi
								dan penguatan Pokmaswas	dan penguatan Pokmaswas	dan penguatan Pokmaswas			
18	YAPEKA SULAWESI UTARA	Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Pembentukan kelompok simpan di Desa Bulutui, Gangga Satu, dan Likupang Dua	Kelompok simpan terbentuk di Desa Bulutui, Gangga Satu, dan Likupang Dua	Kelompok simpan	Kelompok simpan di Bulutui, Gangga Satu, dan Likupang Dua mulai kegiatan menabung	Kelompok simpan di Bulutui, Gangga Satu, dan Likupang Dua meneruskan kegiatan menabung	-	-	-	78.000.000	Blue Ventures	Sulawesi Utara
19	YAPEKA SULAWESI UTARA	Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Peningkatan kapasitas kelompok simpan	Kelompok simpan mampu secara mandiri mengelola kelompoknya	Kelompok simpan yang mandiri	Kelompok simpan di Bulutui, Gangga Satu, dan Likupang Dua mampu mengelola kelompoknya secara mandiri	-	-	-	-	82.500.000	Blue Ventures	Sulawesi Utara
20	YAPEKA SULAWESI UTARA	Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi	Menyelenggarakan forum dialog provinsi melalui sektor perikanan dan kelautan serta sektor-sektor yang relevan lainnya untuk harmonisasi pengelolaan ruang laut dan perikanan	Forum dialog provinsi melalui sektor perikanan dan kelautan serta sektor-sektor yang relevan lainnya untuk harmonisasi pengelolaan ruang laut dan perikanan masyarakat terselenggara	Forum dialog di tingkat provinsi	Diskusi revisi RZWP3K dan integrasinya ke dalam RTRWP Sulawesi Utara	-	-	-	-	60.000.000	Blue Ventures	Sulawesi Utara

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Tujuan Strategis yang disasar	Nama Kegiatan TJSL	Output Kegiatan TJSL	Satuan Output	Target Output 2022	Target Output 2023	Target Output 2024	Target Output 2025	Target Output 2026	Indikatif alokasi anggaran untuk 5 Tahun (2022 s.d. 2026) dalam Rp.	Sumber Pendanaan	Lokasi
			pengelolaan perikanan masyarakat										
21	YAPEKA SULAWESI UTARA	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Pengumpulan data transdisipliner terdiri dari komponen sosio-ekologi utama, termasuk perikanan demersal skala kecil, pengurangan risiko bycatch duyung di titik-titik panas (tumpang tindih antara daerah penangkapan ikan dan daerah penampakan dugong)	Data transdisipliner terdiri dari komponen sosio-ekologi utama, termasuk perikanan demersal skala kecil, pengurangan risiko bycatch duyung di titik-titik panas (tumpang tindih antara daerah penangkapan ikan dan daerah penampakan dugong) terkumpul	Set data sosio-ekologi		-	-	-	-	7.700.000	CEPF	Sulawesi Utara
22	YAPEKA SULAWESI UTARA	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang	Penyusunan draf rencana pengelolaan CB-MPA yang dibuat dengan pendekatan	Draf rencana pengelolaan CB-MPA yang dibuat dengan pendekatan ko-kreasi	Draf rencana pengelolaan CB-MPA		-	-	-	-	28.900.000	CEPF	Sulawesi Utara



No	Nama Lembaga /Perusahaan	Tujuan Strategis yang disasar	Nama Kegiatan TJSL	Output Kegiatan TJSL	Satuan Output	Target Output 2022	Target Output 2023	Target Output 2024	Target Output 2025	Target Output 2026	Indikatif alokasi anggaran untuk 5 Tahun (2022 s.d. 2026) dalam Rp.	Sumber Pendanaan	Lokasi
		dan Aman	ko-kreasi										
23	YAPEKA SULAWESI UTARA	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Penyepakatan mekanisme insentif perikanan demersal skala kecil berkelanjutan di Bulu dan Bukide Timur melalui mekanisme Dana Desa	Mekanisme insentif perikanan demersal skala kecil berkelanjutan di Bulu dan Bukide Timur melalui mekanisme Dana Desa disepakati	Mekanisme insentif perikanan demersal skala kecil berkelanjutan di Bulu dan Bukide Timur	Pembentukan Pokdarwis di Bukide Timur dengan pembiayaan dari Dana Desa	-	-	-	-	5.400.000	CEPF	Sulawesi Utara
24	YAPEKA SULAWESI UTARA	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Penyediaan sarana dan prasarana budidaya teripang di Bulu	Sarana dan prasarana budidaya teripang tersedia di Bulu	Paket sarana dan prasarana budidaya teripang	Sarana dan prasarana budidaya teripang	-	-	-	-	3.200.000	CEPF	Sulawesi Utara
25	YAPEKA SULAWESI UTARA	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Membangun kapasitas masyarakat di Bulu untuk budidaya teripang	Terbangunnya kapasitas masyarakat di Bulu untuk budidaya teripang	Orang anggota kelompok/koperasi	Pelatihan pengolahan hasil budidaya teripang	-	-	-	-	31.100.000	CEPF	Sulawesi Utara
26	YAPEKA SULAWESI UTARA	Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi	Penyiapan rencana bisnis dan jaringan jual beli teripang	Rencana bisnis dan jaringan jual beli teripang disiapkan	Rencana bisnis teripang	- Draft rencana bisnis dan jaringan jual beli teripang - Penyepakatan draft rencana bisnis dan	-	-	-	-	23.100.000	CEPF	Sulawesi Utara

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Tujuan Strategis yang disasar	Nama Kegiatan TJSL	Output Kegiatan TJSL	Satuan Output	Target Output 2022	Target Output 2023	Target Output 2024	Target Output 2025	Target Output 2026	Indikatif alokasi anggaran untuk 5 Tahun (2022 s.d. 2026) dalam Rp.	Sumber Pendanaan	Lokasi
		Seimbang dan Aman				jaringan jual beli teripang oleh anggota koperasi							
27	YAPEKA SULAWESI UTARA	Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi	Pembangunan sistem pengelolaan pengetahuan ekosistem lamun dan pesisir	Adanya sistem pengelolaan pengetahuan ekosistem lamun dan pesisir	Nota kesepahaman dengan Politeknik Negeri Nusa Utara	Nota kesepahaman dengan Politeknik Negeri Nusa Utara dalam hal penelitian ekosistem pesisir dan kerja praktek (magang) mahasiswa	-	-	-	-	19.200.000	CEPF	Sulawesi Utara
28	YAPEKA SULAWESI UTARA	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Pengumpulan informasi sosio-ekologis yang relevan untuk formalisasi CB-MPA untuk kemudian dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan terkait	Informasi sosio-ekologis yang relevan untuk formalisasi CB-MPA dikumpulkan, dikomunikasikan dan dipublikasikan di saluran yang relevan	Naskah akademik	Naskah akademik	Naskah akademik	-	-	-	9.500.000	CEPF	Sulawesi Utara
29	YAPEKA SULAWESI UTARA	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang	Pengumpulan informasi dugong menggunakan kuesioner terstandarisasi	Informasi dugong menggunakan kuesioner terstandarisasi terkumpul	Set data	-	-	-	-	-	10.000.000	IKI	Sulawesi Utara

Paraf Koordinasi : Biro Hukum  
 Kasubag Kabag. Perundang-Undangan  
 1 4 1

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Tujuan Strategis yang disasar	Nama Kegiatan TJSL	Output Kegiatan TJSL	Satuan Output	Target Output 2022	Target Output 2023	Target Output 2024	Target Output 2025	Target Output 2026	Indikatif alokasi anggaran untuk 5 Tahun (2022 s.d. 2026) dalam Rp.	Sumber Pendanaan	Lokasi
		dan Aman											
30	YAPEKA SULAWESI UTARA	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Pengumpulan informasi karbon biru dalam sedimen lamun	Informasi karbon biru dalam sedimen lamun terkumpul	Set data	- Sampel sedimen terkumpul - Sampel sedimen teranalisis	Penulisan laporan terkait data karbon biru	-	-	-	50.000.000	IKI	Sulawesi Utara
31	YAPEKA SULAWESI UTARA	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Pengumpulan informasi jasa lingkungan ekosistem lamun menggunakan metode B/RUV	Informasi jasa lingkungan ekosistem lamun menggunakan metode B/RUV terkumpul	Set data	- Footage terkumpul - Footage teranalisis	Penulisan laporan terkait data jasa lingkungan ekosistem lamun	-	-	-	50.000.000	IKI	Sulawesi Utara
32	YAPEKA SULAWESI UTARA	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Pengumpulan informasi populasi dugong melalui <i>survey drone</i>	Informasi populasi dugong melalui <i>survey drone</i> terkumpul	Set data	- Pilot drone terlatih dan tersertifikasi APDI - Pilot drone terlatih dalam metode pengambilan sampel dan rencana terbang penelitian	- Data sampel terambil - Data teranalisis - Penulisan laporan terkait <i>survey drone</i>	-	-	-	50.000.000	IKI	Sulawesi Utara
33	YAPEKA SULAWESI UTARA	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam,	Pengumpulan informasi lamun melalui metode	Informasi lamun melalui metode <i>seagrasswatch</i> terkumpul	Set data	Latihan pengambilan data menggunakan metode <i>seagrasswatch</i>	- Data sampel terambil - Data teranalisis - Penulisan laporan terkait	-	-	-	50.000.000	IKI	Sulawesi Utara

Paralel Koordinasi : Biro Hukum

Kesubag	Kabag. Perundang-Undangan	Kpo
f	4	3

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Tujuan Strategis yang disasar	Nama Kegiatan TJSL	Output Kegiatan TJSL	Satuan Output	Target Output 2022	Target Output 2023	Target Output 2024	Target Output 2025	Target Output 2026	Indikatif alokasi anggaran untuk 5 Tahun (2022 s.d. 2026) dalam Rp.	Sumber Pendanaan	Lokasi
		Bergizi Seimbang dan Aman	<i>seagrasswatch</i>				<i>seagrasswatch</i>						
34	YAPEKA SULAWESI UTARA	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Inisiasi model usaha budidaya spirulina di Desa Tarabitan yang berkontribusi terhadap usaha perlindungan laut	Model usaha budidaya spirulina di Desa Tarabitan yang berkontribusi terhadap usaha perlindungan laut terinisiasi	Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerjasama penggunaan lahan untuk kolam spirulina</li> <li>- Workshop sosialisasi budidaya spirulina</li> <li>- Kolam budidaya spirulina terbangun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan pengelolaan budidaya spirulina</li> <li>- Pelatihan pasca panen budidaya spirulina</li> <li>- Pelatihan pemasaran spirulina</li> </ul>	-	-	-	70.000.000	IKI	Sulawesi Utara

Paralel Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag. Perundang-Undangan	Biro
f	g	h

## LAMPIRAN : EXECUTIVE SUMMARY/RINGKASAN STUNTING SULAWESI UTARA

Stunting jika dikutip dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Sedangkan pengertian stunting menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah anak balita dengan nilai z-scorenya kurang dari -2.00 SD/standar deviasi (stunted) dan kurang dari -3.00 SD (severely stunted). Jadi dapat disimpulkan bahwa stunting merupakan gangguan pertumbuhan yang dialami oleh balita yang mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan anak yang tidak sesuai dengan standarnya sehingga mengakibatkan dampak baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Arahan presiden Republik Indonesia terhadap percepatan penurunan stunting di Indonesia telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Hal ini menjadi fokus utama Presiden, karena semakin banyak kasus stunting yang terjadi di Indonesia. Penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi yang diperoleh oleh balita sejak awal masa emas kehidupan pertama, dimulai dari dalam kandungan (9 bulan 10 hari) sampai dengan usia dua tahun. Stunting akan terlihat pada anak saat menginjak usia dua tahun, yang mana tinggi rata-rata anak kurang dari anak seusianya.

Penyebab utama stunting diantaranya, asupan gizi dan nutrisi yang kurang mencukupi kebutuhan anak, pola asuh yang salah akibat kurangnya pengetahuan dan edukasi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, buruknya sanitasi lingkungan tempat tinggal seperti kurangnya sarana air bersih dan tidak tersedianya sarana MCK yang memadai serta keterbatasan akses fasilitas kesehatan yang dibutuhkan bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Oleh sebab itu untuk mengukur status gizi balita, kondisi keluarga rentan dan capaian kinerja pemerintah, maka terdapat beberapa metode pengumpulan data yang telah dilakukan secara langsung dilapangan maupun melalui hasil survei oleh lembaga pemerintah terkait kondisi prevalensi stunting di Sulawesi Utara, sebagai berikut.

Sulawesi Utara Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag. Perundang-Undangan	Biro
f	g	h

## A. elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM)

Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) merupakan pencatatan dan pelaporan berbasis masyarakat dengan teknologi elektronik untuk merekam data individu dan hasil penimbangan, terutama di Posyandu serta mengolah hasil input data tersebut menjadi status gizi by name by address.

Penggunaan e-PPGBM bertujuan agar tenaga pelaksana gizi dan pemangku kebijakan di daerah lebih mudah dalam mengamati permasalahan gizi di wilayah mereka untuk selanjutnya mengambil keputusan terhadap dan tindakan apa yang akan dilakukan, baik secara komunitas maupun individu. Sebagaimana kita sadari bersama, bahwa dalam upaya perbaikan gizi masyarakat, khususnya gizi anak, dibutuhkan program multi sektoral yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting adanya ketersediaan data secara akurat dan berkelanjutan. Rekapitan hasil pengukuran e-PPGBM posisi bulan februari tahun 2023 se-Sulawesi Utara disajikan pada table berikut:

REKAPAN PENGUKURAN DAN PREVALENSI BALITA STUNTING  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
PENGUKURAN BULAN FEBRUARI TAHUN 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	SASARAN PROYEKSI	ENTRY SASARAN	ENTRY PENGUKURAN	%	STUNTING	%	WASTING	%
1	BOLAANG MONGONDOW	21.721	15.892	15.120	95,14	97	0,64	205	1,36
2	MINAHASA	21.974	18.566	8.045	43,33	129	1,60	88	1,09
3	KEPULAUAN SANGIHE	8.198	6.688	6.522	97,52	213	3,27	267	4,09
4	KEPULAUAN TALAUD	7.206	5.322	3.829	71,95	409	10,68	229	5,98
5	MINAHASA SELATAN	14.818	14.190	12.878	90,75	351	2,73	55	0,43
6	MINAHASA UTARA	15.634	12.307	10.560	85,80	358	3,39	205	1,94
7	BOLAANG MONGONDOW UTARA	7.216	5.221	2.231	42,73	97	4,35	139	6,23
8	KEPULAUAN SITARO	4.155	3.462	3.421	98,82	20	0,58	49	1,43
9	MINAHASA TENGGARA	8.646	7.941	6.931	87,28	120	1,73	81	1,17
10	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	7.064	5.445	5.442	99,94	195	3,58	323	5,94
11	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	5.926	5.910	4.651	78,70	326	7,01	180	3,87
12	KOTA MANADO	30.714	19.959	14.572	73,01	79	0,54	126	0,86
13	KOTA BITUNG	19.766	14.603	8.137	55,72	261	3,21	249	3,06
14	KOTA TOMOHON	7.052	4.095	3.941	96,24	10	0,25	5	0,13
15	KOTA KOTAMOBAGU	10.477	7.285	5.127	70,38	205	4	79	1,54
	<b>SULAWESI UTARA</b>	<b>190.567</b>	<b>146.886</b>	<b>111.407</b>	<b>75,85</b>	<b>2.870</b>	<b>2,58</b>	<b>2.280</b>	<b>2,05</b>

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kab. Bitung	Kab. P. Mandaja-U. Jangani	Kab. ...
f	g	h

Adapun hasil pelaporan dari masing-masing puskesmas ke provinsi tersebut menunjukkan angka prevalensi stunting di Sulawesi Utara tahun 2023 posisi bulan Februari sebesar 2,58%, atau berjumlah 2.870 balita. Angka tersebut merupakan hasil pengukuran balita dari 75,85% balita yang telah terdata, atau berjumlah 111 ribu balita telah diukur dari 146 ribu balita yang telah terdata.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri pemerintah Sulawesi Utara dimana hasil pengukuran balita belum 100% terukur dari total jumlah balita yang terdata, sehingga angka prevalensi yang muncul tersebut belum cukup menggambarkan kondisi senyatanya dilapangan.

Oleh sebab itu, perlu adanya perluasan jangkauan pendataan dan pengukuran balita, kolaborasi program strategis yang tepat sasaran serta berdampak langsung pada intervensi spesifik dan sensitive secara optimal, efektif dan harmonis dalam percepatan penurunan stunting di Bumi Nyiur Melambai.

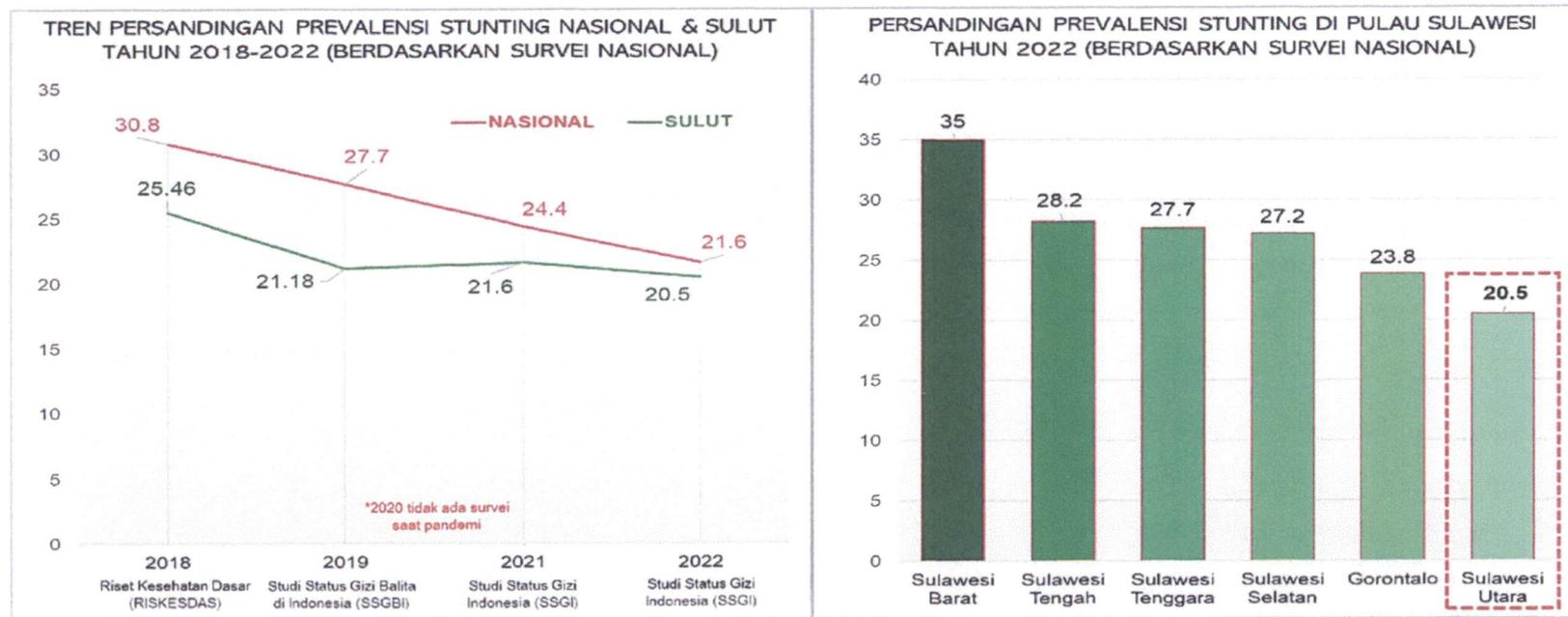
## B. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)

Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) merupakan survei berskala nasional yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan status gizi balita (stunting, wasting, dan underweight) tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Studi yang dilakukan sejak tahun 2019 ini dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Biro Pusat Statistik (BPS) dan didukung oleh Sekretariat Wakil Presiden RI. Saat ini, pelaksanaan SSGI menjadi amanat Perpres No. 72 Tahun 2021 dimana Kementerian Kesehatan bertanggung jawab untuk mempublikasikan data prevalensi stunting kabupaten/kota setiap tahunnya.

Data SSGI berasal dari survei yang menyasar rumah tangga dengan anak balita serta dilakukan oleh enumerator terlatih yang memiliki latar belakang pendidikan gizi. SSGI dilakukan secara tahunan sejak 2019 dengan pengecualian pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19. Meskipun sama-sama berbasis survei, Riskesdas berbeda dengan SSGI karena pengumpulan data Riskesdas dilakukan setiap lima tahun sekali serta menggunakan sampel rumah tangga umum, tidak terbatas pada rumah tangga dengan balita.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perindang-Undangan	Karo
		

Berdasarkan hasil survei berskala nasional, yakni Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), Prevalensi Stunting di Sulawesi Utara mengalami penurunan yang signifikan, yakni dari angka 25,46% di Tahun 2018 menjadi 20,5% di Tahun 2022 atau berkurang sebesar 4,96% dalam 4 Tahun terakhir serta terus berada dibawah rata-rata nasional. Jika dilihat berdasarkan kondisi wilayah pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara menjadi daerah dengan prevalensi stunting yang paling rendah ditahun 2022.



Berdasarkan hasil rilis atau publikasi dari ke dua data tersebut, yakni antara SSGI dan e-PPGBM terdapat perbedaan sifat yang menentukan perbedaan kegunaan data. SSGI dan Riskesdas digunakan untuk monitoring dan evaluasi kemajuan intervensi gizi di tingkat nasional dan daerah. Sementara, data e-PPGBM berguna untuk memonitor pertumbuhan balita setiap bulannya dan termasuk ke dalam surveilans program gizi. Data e-PPGBM juga dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan penetapan sasaran program gizi di daerah karena bersifat real-time. Penggunaan ketiga data ini harus digunakan secara tepat sesuai fungsinya.

Departemen Koordinasi : Biro Hukum

Kesubag	Kabag. Perencanaan dan Anggaran	Kiro
f	k	↓

Dampak stunting pada anak akan terlihat pada jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek berdampak terhadap pertumbuhan fisik yaitu tinggi anak di bawah rata-rata anak seusianya. Selain itu, juga berdampak pada perkembangan kognitif dikarenakan terganggunya perkembangan otak sehingga dapat menurunkan kecerdasan anak. Sedangkan untuk jangka panjang, stunting akan menyebabkan anak menjadi rentan terjangkit penyakit seperti penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas di usia tua. Selain itu, dampak jangka panjang bagi anak yang menderita stunting adalah berkaitan dengan kualitas SDM suatu negara. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Jika stunting tidak segera diatasi hal ini tentunya akan menyebabkan penurunan kualitas SDM di masa yang akan datang.

### C. Cakupan Layanan Essensial dan Supply Daerah

Cakupan layanan essensial adalah layanan yang diberikan atau diterima langsung oleh sasaran intervensi, contohnya yaitu remaja, Calon Pengantin/Pasangan Usia Subur (PUS) Ibu Hamil Anak Usia di Bawah Lima Tahun (Balita) dan Keluarga Berisiko. Sedangkan Cakupan layanan supply adalah layanan untuk mendukung atau untuk memastikan tercapainya sasaran intervensi berdasarkan target OPD Pengampunya.

Adapun berdasarkan hasil pelaksanaan Penilaian Kinerja Tahun 2023 terkait penyajian capaian cakupan layanan essensial dan supply daerah, yang telah dipaparkan oleh pemerintah kab/kota di Sulawesi Utara dapat dilihat pada table berikut:

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perindang-Undangan	Kapo
f	u	l



No	Data/Indikator	SITARO	BOLMUT	TOMOHOH	MINUT	TALAUD	BOLTIM	MANADO	BOLSEL	MITRA	BITUNG	MINSEL	SANGIHE	KOTAMOBAGU	BOLMONG	MINAHASA
<b>CAPAIAN INDIKATOR DATA ESSENSIAL DAERAH TAHUN 2022</b>																
10	Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	98,6%	96.50%	100%	100%	100%	100%	92.00%	100%
11	Persentase Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	100%	98%	100%	95.50%	83%	73%	97,30%	88,1%	71.40%	95%	100%	99.00%	99.60%	1030 ibu hamil	100%
12	Persentase Unmet Need pelayanan keluarga berencana	22,70%	25,25%	24.83	27.24	1,54%	18.2	25,18%	18,48%	4.17%	27.10%	100%	16.63%	16.11%	13.50%	23.29
13	Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan	14,53%	8,19%	NA	14.15	10%	11.85	NA	13,35%	NA	0.23%	35,50%	3.33%	NA	45 kehamilan	4,50%
14	Persentase Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	74,99%	36%	51.84%	60.90%	90%	29.26%	22,90%	38,9%	30.20%	38.5%	59,06%	81.04	33.10%	47.00%	50,20%
15	Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP- ASI)	100%	50%	NA	100%	90%	1417	16328 (84,1)	96,35%	95%	72.9%	100%	93.03%	100%	1688	100%
16	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	59,32%	100%	NA	100%	90%	5%	14%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
17	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	87,89%	89%	94.40%	81.60%	90%	4411	18039	79,83%	84.14%	74%	79,96%	98.03%	7485	14869	93,6
18	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	NA	100%	100%	100%	90%	228	122	96,35%	95.48%	100%	98,53%	93.63%	29%	489	100%
19	Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	32,05%	89%	106.90%	3,552	36,82%	5692	6039 (90,3%)	97%	93.44%	89.6%	100%	67%	1289	3.405	110,50%
20	Persentase Keluarga yang Stop BABS	98,52%	100%	100%	96%	90%	92.59%	100%	92,62%	95.80%	100%	98,28%	95.80%	100%	74.00%	100%
21	Persentase Keluarga yang melaksanakan PHBS	75,67%	50%	73.54%	93.60%	38,73%	71%	69%	18,3%	95.80%	100%	83,02%	12.13%	89.70%	70.00%	84%
22	Persentase Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	100%	NA	NA	100%	0,64%	NA	100%	NA	NA	NA	40%	3.6%	100%	0.013%	-
23	Persentase Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	100%	100%	83%	88.65%	98,26%	74%	6291 (99%)	72,9%	99.46%	30.1%	86,5%	68.26%	41.62%	7.80%	55,7



No	Data/Indikator	SITARO	BOLMUT	TOMOHON	MINUT	TALAUD	BOLTIM	MANADO	BOLSEL	MITRA	BITUNG	MINSEL	SANGIHE	KOTAMOBAGU	BOLMONG	MINAHASA
<b>CAPAIAN INDIKATOR DATA ESSENSIAL DAERAH TAHUN 2022</b>																
24	Persentase Keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan	NA	100%	85%	85%	90%	100%	100%	87,70%	100%	28.57%	100%	86.83%	18.91%	48.49%	78,91
25	Persentase Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	NA	100%	0.24	100%	50%	0.018	90% (DPAP) 0,06% (Dinas Pangan)	NA	NA	NA	dilaksanakan hanya 6 orang kelompok x 20 orang=120 orang	100%	100%	0.0012%	-
26	Persentase Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	87,07%	89,87%	45.19%	61.79%	3,58%	89.47%	91,17% (Dinkes), 74,91% (PUPR)	72,87%	91%	NA	80%	59.83%	100%	92.72%	84.25%
27	Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	89,44%	110	21.576	2826	NA	279 SR	77% (Dinkes), 75,88% (PUPR)	76,38%	91%	NA	61,4%	52.49%	100%	20047 KK	70.79%
28	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi	98,92%	100%	0	95%	100%	69.13%	100%	100%	94.05%	NA	penerima 9535	30.72%	NA	100.00%	100%
29	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur	100%	NA	NA	100%	NA	20.57%	100%	NA	NA	NA	penerima 10672	NA	100%	NA	20%

<b>Paraf Koordinasi : Biro Hukum</b>		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Kar
f	y	b

**CAPAIAN INDIKATOR DATA SUPPLY DAERAH TAHUN 2022 – PER KAB/KOTA DI SULAWESI UTARA**

No	Data/Indikator	SITARO	BOLMUT	TOMOHOH	MINUT	TALAUD	BOLTIM	MANADO	BOLSEL	MITRA	BITUNG	MINSEL	SANGIHE	KOTAMOBAGU	BOLMONG	MINAHASA
<b>CAPAIAN INDIKATOR DATA SUPPLY DAERAH TAHUN 2022</b>																
1	Jumlah Rapat Koordinasi tingkat Kabupaten/Kota	2	8	3	2	2	2	5	3	1	1	5	10	2	3	9 kali
2	Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan Rembuk Stunting	100%	100%	100%	100%	NA	100%	NA	NA	33.30%	NA	100%	100%	1%	46%	100%
3	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintah daerah kabupaten/kota	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	2 Kali	1 Kali	1 Kali	100%	2 Kali	2 Kali	2 Kali	Ada
4	Cakupan Bantuan Jaminan Nasional Penerima Iuran (PBI) Kesehatan	33.76%	20,716	97.19%	98.36%	NA	17.18%	98%	71,378 jiwa	7,693	NA	NA	48,249	NA	10,000	97.538 jiwa
5	Tersedianya kebijakan/peraturan bupati/walikota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan stunting	YA	YA	YA	YA	NA	YA	NA	YA	YA	NA	YA	YA	YA	YA	1
6	Persentase pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan stunting	100%	100%	NA	100%	NA	100%	NA	100%	100%	NA	70%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Kader Pembangunan Manusia di Desa/Kelurahan yang mendapatkan pembinaan/ bimbingan/pelatihan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	35%	100%	NA	100%	175.524	100%	100%	NA	70%	100%	100%	100%	59,47%
8	Persentase Desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa, Rencana Kerja pemerintah desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa)	100%	100%	75%	100%	NA	100%	NA	100%	100%	NA	70%	100%	100%	100%	84,07%

Rapat Koordinasi : Biro Hukum  
 Kabupaten Kabupaten Perindera-Undangan  
 1 4 3

No	Data/Indikator	SITARO	BOLMUT	TOMOHON	MINUT	TALAUD	BOLTIM	MANADO	BOLSEL	MITRA	BITUNG	MINSEL	SANGIHE	KOTAMOBAGU	BOLMONG	MINAHASA
<b>CAPAIAN INDIKATOR DATA SUPPLY DAERAH TAHUN 2022</b>																
9	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	100%	100%	60%	100%	NA	56.70%	NA	100%	100%	NA	90%	49,7%	100%	100%	0,00%
10	Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	36.2	90%	100%	100%	100%	84,07%
11	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintahan desa	2 Kali	2 Kali	NA	2 Kali	NA	2 Kali	2 Kali	NA	1 Kali	NA	1 Kali	1 Kali	15 Kali	2 Kali	2 kali
12	Persentase Desa/kelurahan Bebas Stunting	80%	49,5%	81%	87.50%	12,41%	7%	82,70%	68%	0.6	NA	33,33%	52.69%	NA	75.30%	199 (73,3)%
13	Persentase pemerintah desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi penurunan stunting	100%	100%	NA	90.40%	90%	32%	100%	100%	61.10%	100%	90%	100%	45.50%	100.00%	100%
14	Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan stunting lintas agama	2 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	NA	NA	NA	2 Kali	NA	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	NA	Belum ada
15	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	98,9%	100%	100%	NA	85%	92.59%	100%	3,70%	18.75%	NA	100%	100%	100%	100.00%	7,4% (20 desa)
16	Persentase Desa/Kelurahan yang telah terbebas dari buang air besar sembarangan (ODF)	63,4%	98%	100%	62.50%	90%	92.59%	100%	80,25%	89.50%	100%	63,27%	95.80%	100%	74.00%	100%
17	Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas	NA	100%	NA	89.50%	85%	100%	100%	NA	100%	100%	90%	100%	100%	80.00%	82%
19	Terimplementasikannya sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ya
20	Persentase posyandu yang memenuhi standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang	100%	100%	100%	82.70%	88%	100%	100%	100%	81.15%	97.1%	100%	100%	100%	73.40%	50%
21	Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Stunting	1 Kali	2 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	2 Kali	1 Kali	1 Kali	2 Kali	2 Kali	1 Kali	2 Kali	1 Kali	1 Kali	100%
22	Persentase desa/kelurahan yang memiliki bidan	100%	100%	100%	79.38%	100%	38.27%	100%	35,80%	100%	NA	78%	53.89%	100%	100.00%	162 desa (60%)



No	Data/Indikator	SITARO	BOLMUT	TOMOHOH	MINUT	TALAUD	BOLTIM	MANADO	BOLSEL	MITRA	BITUNG	MINSEL	SANGIHE	KOTAMOBAGU	BOLMONG	MINAHASA
<b>CAPAIAN INDIKATOR DATA SUPPLY DAERAH TAHUN 2022</b>																
23	Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	10%	NA	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50%	75%	100%	100.00%	
24	Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko stunting	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	3,158
25	Tersedianya data keluarga risiko Stunting melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	
26	Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	100%	73,83%	61%	6,067	100%	NA	NA	88,69%	15,28%	NA	100%	18,56%	PIK-R 33, BKR 17	11 PIK-R	12,419
27	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1000 HPK	31,33%	76%	100%	100%	80%	NA	100%	65,72%	39,58%	25%	100%	92,81%	27%	14,15%	1 BKR, 6 PIK
28	Age Specific Fertility Rate/ASFR (15-19)	14,54%	NA	22,9	15,2	146	NA	5605 (93%)	1,5%	6,21	100%	NA	7,41%	19	46,96%	2,9
29	Persentase Desa/kelurahan yang memiliki guru PAUD terlatih pengasuhan stimulasi penanganan stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di Kabupaten/Kota	0	66,3%	100%	5%	90%	0	3,74%	58,02%	0	NA	NA	143	100%	24,90%	3%
30	Persentase Desa/kelurahan yang memiliki Lembaga PAUD yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	0	80%	100%	90%	70%	0	2%	30,86%	83,92%	NA	100%	100%	100%	37,80%	32%
31	Terlaksananya kampanye nasional pencegahan Stunting	2 Kanal	3 Kanal	1 Kanal	1 Kanal	1 Kanal	1 Kanal	1 Kanal	3 Kanal	NA	NA	NA	3 Kanal	NA	3 Kanal	
32	Terlaksananya intervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting	1 Kali	NA	1 Kali	1 Kali	1 Kali	NA	NA	NA	1 Kali	NA	NA	1 Kali	1 Kali	1 Kali	Secara Mandiri
33	Jumlah Keluarga Miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	1359 Jiwa	3913 Jiwa	6206 KPM	7.563 (PKH) 11.127 (BLT DD)	7428 Jiwa	3579 Jiwa	14180 Jiwa	3848 Jiwa	NA	28 Jiwa	10670 Jiwa	3685 Jiwa	3373 Jiwa	10383 KPM	9.498 KPM

Paralel Koordinasi : Biro Hukum  
 Kasubag Kabag. Perundang-Undangan Karo  
 f l j

No	Data/Indikator	SITARO	BOLMUT	TOMOHON	MINUT	TALAUD	BOLTIM	MANADO	BOLSEL	MITRA	BITUNG	MINSEL	SANGIHE	KOTAMOBAGU	BOLMONG	MINAHASA
<b>CAPAIAN INDIKATOR DATA SUPPLY DAERAH TAHUN 2022</b>																
34	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	2059 Jiwa	5459 Jiwa	6206 KPM	13.337 Jiwa	4878 Jiwa	478 Jiwa	16533 Jiwa	6464 jiwa	NA	NA	10670 Jiwa	9328 Jiwa	4301 Jiwa	19752 KPM	14.673 KPM
35	Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi	NA	16	NA	45	NA	13	40	18	27	NA	58	28	30	28	64 orang

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
f	h	h

#### D. Intervensi

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, upaya penurunan stunting tidak hanya dilakukan oleh urusan Kesehatan saja, tetapi diharapkan bisa dilakukan oleh semua pihak, baik itu pemerintah desa, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dengan adanya sinergi dan kerja sama di berbagai sektor pemerintahan diharapkan bisa menurunkan angka stunting di Sulawesi Utara.

Dalam rangka menurunkan stunting di Sulawesi Utara, pemerintah akan memperhatikan Strategi Nasional Percepatan penurunan stunting dalam waktu lima tahun ke depan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, hal ini bisa juga dilakukan dengan memperhatikan pola makan dengan mengomsumsi jenis makanan beragam dan seimbang;
- 2) Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi dan balita;
- 3) Mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak;
- 4) Menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga;
- 5) Memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait stunting, pola asuh yang baik untuk mencegah stunting serta mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak;
- 6) Melakukan vaksinasi lengkap semenjak bayi lahir sesuai dengan anjuran dan himbauan IDAI.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk pengobatan stunting jika anak sudah didiagnosa menderita stunting adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan terapi awal seperti memberikan asupan makanan yang bernutrisi dan bergizi;
- 2) Memberikan suplemen tambahan berupa vitamin a, zinc, zat besi, kalsium dan yodium;
- 3) Memberikan edukasi dan pemahaman kepada keluarga untuk menerapkan pola hidup bersih dengan menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan tempat tinggal.

Pusat Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag. Perundang-undangan	Karo
1	4	1

Sejalan dengan Arahana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang diimplementasikan ke daerah melalui Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 diarahkan untuk memantapkan pembangunan manusia di Sulawesi Utara antara lain melalui pencapaian target prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024.

Terdapat 5 Isu Strategis Percepatan Penurunan Stunting di Sulawesi Utara yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah saat ini, yaitu:

- 1) Komitmen, kelembagaan dan tata kelola pemerintah daerah kabupaten/kota, kecamatan dan pemerintah desa terkait program percepatan penurunan stunting, perlu diperkuat;
- 2) Jangkauan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku terhadap pola asuh anak dan balita serta pemberdayaan masyarakat perlu diperluas;
- 3) Pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang berkualitas pada remaja putri, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, keluarga beresiko dan bayi stunting perlu diintensifkan;
- 4) Pelaksanaan pengukuran, pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap intervensi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran perlu dimantapkan;
- 5) Kerjasama dengan lembaga, badan usaha, serta non pemerintah terkait lainnya untuk berkolaborasi dalam program percepatan penurunan stunting perlu dioptimalkan;

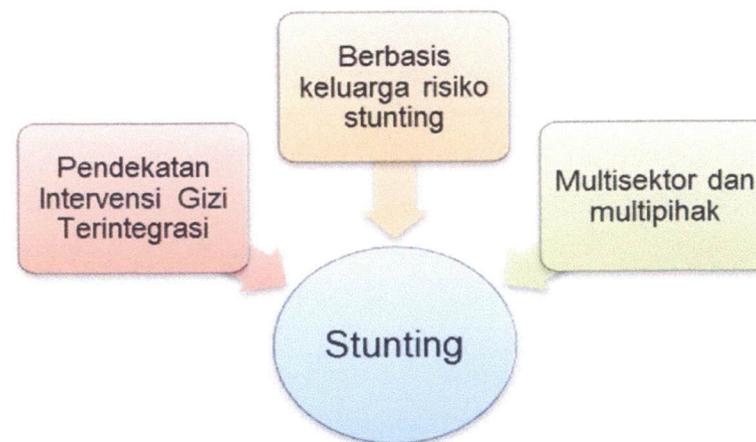
Adapun berbagai strategi Percepatan Penurunan Stunting yang telah dilakukan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Tim Satgas tingkat Provinsi;
- 2) Mengukuhkan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) kepada Komandan Korem 131/Santiago;
- 3) Mengukuhkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bunda Pendamping Keluarga kepada Ir Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan;
- 4) Mengukuhkan Duta Cegah Stunting kepada Rio Dondokambey
- 5) Mengukuhkan Duta Generasi Berencana (Genre) kepada Remaja Berprestasi;
- 6) Mengkampanyekan Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak;

Paralel Koordinasi : Biro Hukum		
Kab. Bag.	Kab. Perindang-Unggan	Karo
f	e	h

- 7) Mengedukasi Masyarakat melalui Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) tentang Pemenuhan Gizi Seimbang dan Pola Asuh Anak dalam Keluarga;
- 8) Mendampingi Calon Pengantin, Keluarga Berisiko, Ibu Hamil, Ibu Pasca Persalinan dan Balita Stunting di tingkat Desa;
- 9) Melakukan Sosialisasi pemberian ASI Eksklusif dan Insiasi Menyusu Dini (IMD) kepada Ibu Hamil;
- 10) Memberikan Tablet Tambah Darah, Makanan Tambahan, Kapsul Vitamin A kepada Remaja Putri, Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis dan Balita Gizi Buruk;
- 11) Meningkatkan Peran Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga serta Pola Asuh Balita;
- 12) Menggelar Rembuk Stunting Tingkat Provinsi;
- 13) Menggelar Penilaian Kinerja Kab/Kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi; dan
- 14) Memberikan Penghargaan Percepatan Penurunan Stunting untuk Mengapresiasi Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam upaya pencapaian target percepatan penurunan stunting, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam Percepatan Penurunan Stunting setidaknya menggunakan tiga pendekatan, dimana pendekatan tersebut berfungsi untuk menajamkan seluruh kegiatan percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa menuju pada penerima manfaat dan berdampak pada penurunan stunting secara signifikan. Tiga pendekatan tersebut meliputi pendekatan intervensi gizi terintegrasi, pendekatan multisektor dan multipihak, serta pendekatan berbasis keluarga risiko stunting.

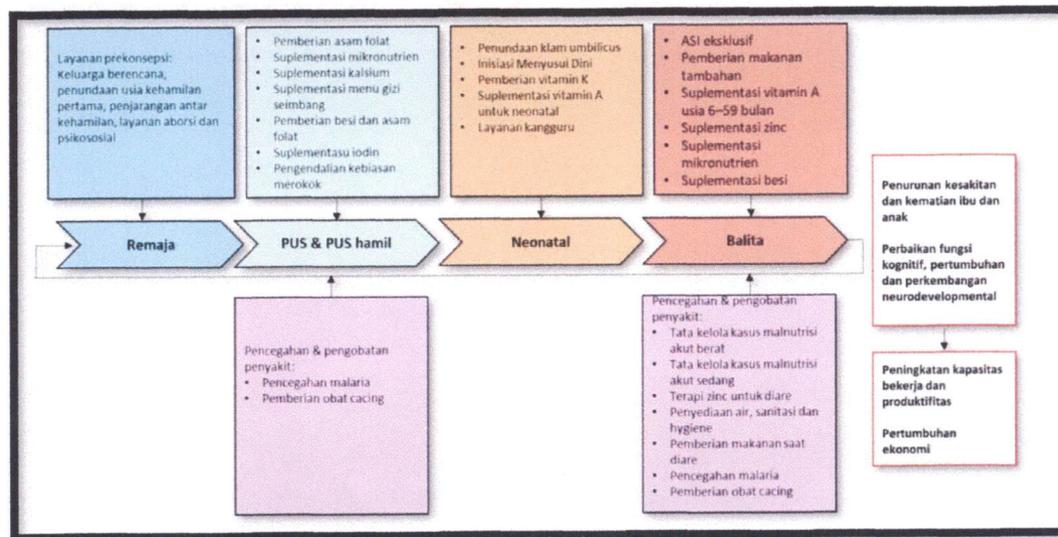


Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Subbag	Kabag. Perundang-Undangan	Kep
f	g	h



Dalam kerangka memperkuat tergapainya kelompok sasaran secara terintegrasi dan tepat waktu maka dalam rumusan program dan kegiatan, dilakukan pemetaan terhadap intervensi yang menysar dari prekonsepsi sampai bayi dibawah usia 59 bulan. Gambar dibawah menggambarkan beberapa intervensi gizi spesifik dan sensitif sesuai dengan kelompok sasaran yang berdampak pada penurunan stunting dan penurunan kesakitan dan kematian ibu dan anak.

### Kerangka Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif berdasarkan Kelompok Sasaran



### Fokus Intervensi Gizi Terintegrasi



Fokus intervensi gizi spesifik dan intervensi akan dilakukan pada masa inkubasi terjadinya kasus stunting, dengan melakukan refocusing intervensi gizi secara terpadu dan terintegrasi maka diharapkan kejadian kasus stunting dapat di cegah secara dini dan simultan.

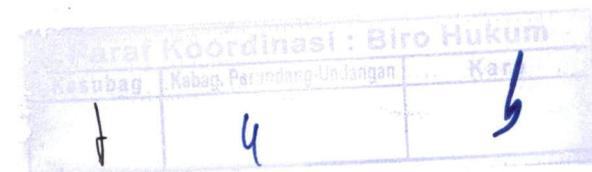
## 2) Pendekatan Multisektor dan Multipihak

Melihat kebutuhan dalam mengintegrasikan intervensi spesifik dan sensitif secara terintegrasi yang tepat waktu dan tepat sasaran, maka kolaborasi dalam kerangka pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting sedikitnya melibatkan multisector dan multipihak.

### Keterlibatan Multisektor dan Multipihak



Koordinasi dan kolaborasi pada level pemerintah daerah dan pemerintah desa, menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan mengingat sistem perencanaan pembangunan dan sistem pemerintahan yang sudah sangat terdesentralisasi hingga ke level desa. Koordinasi ini harus dilakukan dari mulai fase perencanaan sampai dengan evaluasi hasil implementasinya pada level pendampingan keluarga berisiko stunting yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga.



Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi keagamaan, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi percepatan penurunan stunting baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun tahap evaluasi, sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

### 3) Pendekatan Berbasis Keluarga Berisiko

Pelaksanaan percepatan penurunan stunting memiliki tantangan yang cukup berat, mengingat sisa waktu pelaksanaan yang relatif pendek dan target prevalensi stunting yang harus dicapai 14% pada tahun 2024, maka diperlukan sebuah inovasi pendekatan yang dapat menjembatani langsung pada kelompok sasaran, pada faktor dominan dan memiliki daya ungkit yang tinggi serta berkontribusi nyata terhadap keberhasilan percepatan penurunan stunting sebagai sebuah penguatan terhadap pendekatan gizi terintegrasi, multisektor dan multipihak dalam percepatan penurunan stunting.

Pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan sebagai upaya memastikan seluruh intervensi baik spesifik maupun sensitif dapat menjangkau seluruh keluarga yang mempunyai resiko melahirkan anak stunting. Upaya pendekatan berbasis keluarga risiko stunting diharapkan mampu menjadi pemicu sekaligus pemacu dalam meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Pendekatan keluarga berisiko dalam upaya percepatan penurunan stunting memiliki sedikitnya 5 kegiatan prioritas sebagai berikut: 1) penyediaan data keluarga berisiko stunting, 2) pendampingan keluarga berisiko stunting, 3) pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS), 4) surveilans keluarga berisiko stunting; dan 5) audit kasus stunting. Dengan melakukan sedikitnya 5 skema pendekatan berbasis keluarga risiko, diyakini memiliki dampak yang besar dan signifikan dalam percepatan penurunan stunting.

Paralel Koordinasi: Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perencanaan dan Anggaran	Ka
f	6	3

Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan melalui tahapan yang sistemik dan sistematis, mulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, penyediaan data/penapisan, pendampingan, surveilan, audit kasus serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting sebagai rangkaian kegiatan bertahap yang utuh dan menyeluruh. Sebagai sebuah sistem, maka setiap tahapan intervensi saling terkait dan berpengaruh satu sama lain. Begitu juga sebagai sebuah tahapan yang sistematis, setiap tahapan harus dilakukan secara berurutan mulai dari penyediaan data, penapisan, pendampingan, surveilan dan audit kasus.

Data yang tersedia dalam rangka percepatan penurunan stunting harus akurat (reliable) dan sahih (valid), serta selalu terbaru (update), sehingga dapat berfungsi menjadi sumber rujukan penetapan sasaran program-program dari berbagai sektor.

Pada umumnya saat ini pada masing-masing pemerintah daerah telah memiliki data terkait dengan stunting. Namun keberadaan data saat ini pada umumnya masih belum terintegrasi sehingga perlu dilakukan validasi dan verifikasi. Telah ada lesson learned dari beberapa daerah terkait dengan upaya verifikasi, validasi dan sinkronisasi data, yang dapat memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa bahwa data terkait dengan stunting bisa diverifikasi dan divalidasi sehingga bisa menjadi dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting. Validasi data bisa dilakukan berorientasi daerah (local oriented) secara berjenjang dan bisa dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, dan aparat di tingkat bawah (RT/RW, desa/kelurahan) sampai tingkat kecamatan dan kabupaten/kota.

Penyediaan data sasaran percepatan penurunan stunting dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga, dan bersifat otomatisasi atas data sasaran baru maupun data yang sudah tidak menjadi sasaran lagi. Dengan demikian, data sasaran termasuk perubahannya senantiasa termutakhirkan setiap saat sehingga akurasi intervensi berbagai kegiatan terutama oleh Tim Pendamping Keluarga akan tepat sasaran.

Paralel Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-undangan	Kepo
f	g	h

Selanjutnya, dalam merespon target percepatan penurunan stunting serta periode pencegahan dan penanganan stunting yang sangat pendek, maka seluruh kegiatan intervensi spesifik maupun intervensi sensitif dalam percepatan penurunan stunting harus didasarkan pada intervensi yang tepat waktu (*timeliness of services*), tuntas (*seamlessness*), koordinasi (*co-ordination*), kemudahan akses (*easy access*), dan intervensi yang disesuaikan dengan keadaan individu/keluarga berisiko (*service tailored for individual circumstances*). Dengan tuntutan tersebut dalam percepatan penurunan stunting menekankan budaya pelaksanaan intervensi yang fokus pada penyelesaian permasalahan, serta pemenuhan kebutuhan dan penanganan masalah pada kelompok sasaran yaitu keluarga berisiko stunting.

Upaya peningkatan kuantitas maupun kualitas intervensi spesifik dan sensitif dilaksanakan dengan pendampingan keluarga berisiko stunting secara total dan masif (*terintegrasi, terpadu dan manjangkau seluruh keluarga berisiko stunting*) serta audit kasus stunting. Dalam pendampingan keluarga berisiko stunting, dilakukan asesmen yang komprehensif terhadap keluarga calon penerima intervensi spesifik maupun intervensi sensitif melalui kegiatan pendataan dan penapisan. Selain itu, dalam perencanaan penanganan kasus, dilakukan gabungan kasus dan penggabungan pemberian intervensi. Dalam hal ini, jika hasil asesmen menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi calon penerima pelayanan intervensi mempunyai lebih dari satu masalah/kebutuhan, maka untuk memenuhi dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya diberikan beberapa intervensi yang didasarkan pada prinsip besaran risiko yang disandang penerima intervensi.

Para Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. P. dan J.	Kasubag
f	l	h

Untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi percepatan penurunan stunting terutama kualitas keterpaduan program dan kegiatan operasional di lini lapangan maka dilakukan:

1) Penguatan Peran Tim Penggerak PKK

Tim Penggerak PKK mulai tingkat pusat sampai desa/kelurahan sejak dulu telah menjadi mitra pemerintah yang sangat aktif dalam mendukung berbagai program dan kegiatan, mulai dari kesehatan, gizi, KB, sampai masalah lingkungan. Dengan bekal pengalaman yang sangat panjang tersebut, maka TP. PKK di semua tingkatan terutama di desa/kelurahan akan menempati "peran sentral" dalam pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko stunting. Dengan demikian, TP. PKK di lapangan menjadi motor penggerak dalam Tim Pendamping Keluarga bagi keluarga berisiko stunting yang lebih difokuskan kepada masa inkubasi.

2) Penguatan Peran Bidan

Pemahaman, pengalaman serta ketersediaan bidan dalam penanganan masalah stunting merupakan aset dan modal besar dalam pendampingan keluarga berisiko. Tugas keseharian bidan dalam proses perawatan masa kehamilan, kelahiran serta pasca persalinan merupakan pertimbangan khusus dalam penguatan peran bidan. Itulah sebabnya keberadaan bidan di desa memainkan "peran sentral" khususnya dalam proses fasilitasi pelayanan rujukan kesehatan bagi keluarga berisiko stunting.

3) Penguatan Peran Kader

Percepatan penurunan stunting harus diwujudkan dalam sebuah gerakan sosial yang masif dengan arahan yang jelas, maka untuk meningkatkan modal sosial dan prakarsa masyarakat, kader di desa baik itu kader kesehatan, kader keluarga berencana, kader pembangunan manusia, harus dikapitalisasi untuk turut serta dalam skema pendampingan keluarga dalam rangka percepatan penurunan stunting sebagai bagian dari tim pendamping keluarga.

Paralel Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag. Perindang-Undangan	Koordinator
f	k	h

#### 4) Penguatan Sistem Deteksi Dini

Selain memperkuat pendampingan keluarga berisiko, sistem deteksi dini dan pencegahan keluarga berisiko juga mutlak diperlukan dengan memperkuat regulasi pendaftaran calon pengantin (Catin) minimal 3 bulan sebelum menikah (Pra Nikah), dimana waktu tiga bulan ini merupakan waktu minimal yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas kehamilan pada pasangan baru (hasil penelitian menunjukkan bahwa 80% pasangan usia subur baru akan mengalami kehamilan apabila tidak menggunakan alat kontrasepsi) agar tidak terjadi resiko stunting sekaligus sebagai acuan tim pendamping dalam melaksanakan tahapan awal dimulainya pendampingan terhadap keluarga berisiko.

Penguatan tiga aktor serta deteksi dini tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan pendampingan keluarga berisiko stunting. Dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah keluarga, serta kehamilan per tahun maka paling sedikit secara nasional akan di bentuk 200.000 tim pendamping keluarga yang tersebar di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia, dengan demikian satu desa/kelurahan minimal membentuk satu tim pendamping keluarga. Setiap tim pendamping keluarga terdiri dari 3 petugas, dari unsur Bidan, PKK dan Kader yang memenuhi kualifikasi sebagai tim pendamping keluarga di desa/kelurahan. Aksi pendampingan pada dilakukan untuk lebih menjamin keluarga berisiko stunting terfasilitasi dalam memperoleh informasi tentang stunting dan pencegahannya, memperoleh pelayanan kesehatan dan rujukan, memperoleh sanitasi dan air bersih serta menerima bantuan program sosial. Pendampingan oleh tim pendamping keluarga dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan/sosialisasi dan komunikasi perubahan perilaku, fasilitasi pelayanan dan rujukan kesehatan pencegahan stunting, fasilitasi untuk memperoleh akses terhadap sanitasi dan air bersih serta fasilitasi terhadap akses penerimaan program bantuan sosial dan kesehatan.

Adapun berdasarkan hasil pelaksanaan Penilaian Kinerja Tahun 2023 terkait penyajian dukungan sarpras, SDM dan data landas daerah, yang telah dipaparkan oleh pemerintah kab/kota, di Sulawesi Utara dapat dilihat pada table berikut:

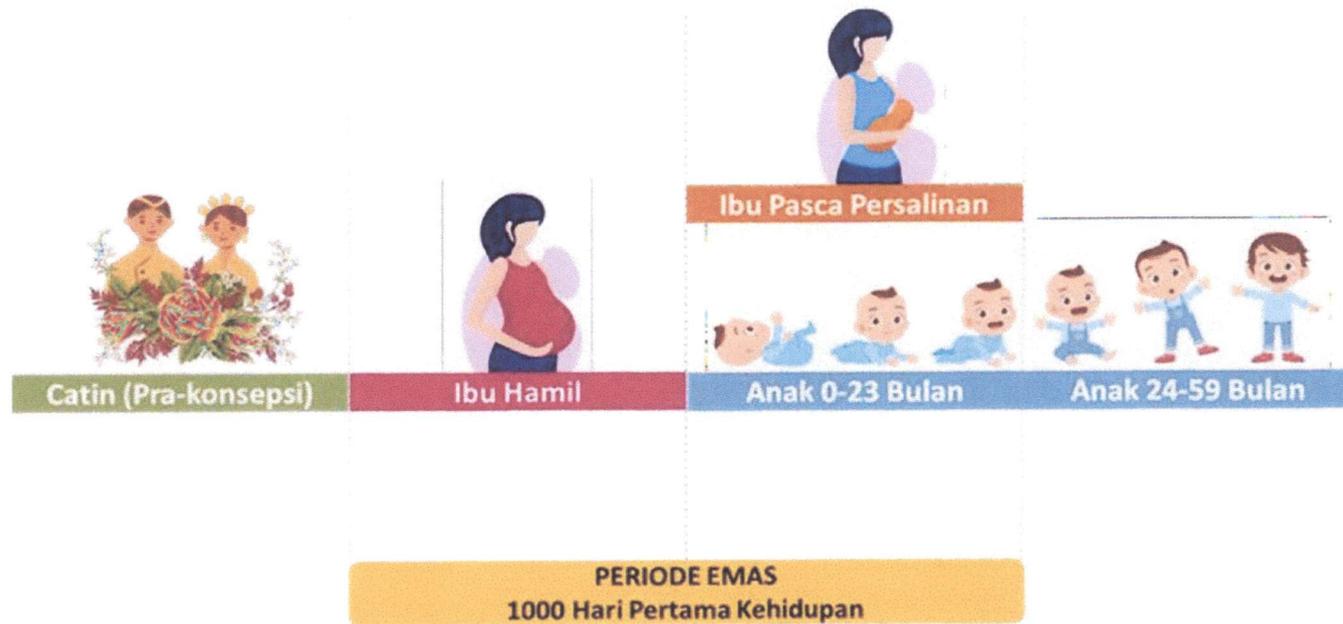
Pusat Koordinasi : Biro Hukum		
Kesbang	Kabag. Perundang-undangan	Karo
f	a	3

**DUKUNGAN SARPRAS, SDM DAN DATA LANDAS DAERAH TERKAIT PENANGANAN STUNTING PER-KAB/KOTA TAHUN 2022**

INDIKATOR/KAB/KOTA	SITARO	BOLMUT	TOMOHOH	MINUT	TALAUD	BOLTIM	MANADO	BOLSEL	MITRA	BITUNG	MINSEL	SANGIHE	KOTAMOBAGU	BOLMONG	MINAHASA
1 Jumlah Puskesmas	13	12	7	11	21	8	16	9	13	9	17	17	5	18	23
2 Jumlah Posyandu	128	112	44	151	153	81	341	83	144	142	17	186	41	218	287
3 Jumlah Bidan	128	139	64	222	144	86	438	145	95	89	-	90	99	284	164
4 Jumlah Ahli Gizi	17	33	13	44	41	16	30	21	21	30	-	26	17	43	9
5 Jumlah Tim Pendamping Keluarga	279	321	77 TIM	519	153	243	348 Kelompok (144.000 orang)	243	432	522 Orang	546	502	96	202 tim	810
6 Jumlah Kader Pembangunan Manusia di Desa/Kelurahan	83	106	134	125	153	81	175,524	81	144	355 Orang	167	145	33	200 KPM	227
7 Jumlah Guru PAUD	230	553 PNS, 52 GTT	223	206	563	387	534	336 Guru	351	241 Orang	262	239	272	401	ASN 144 & Non ASN 682
8 Jumlah Keluarga Berisiko Stunting	7301	5163	3,065	3,261	9899	11,139	13,223	5455	1362	7.814	4484	5836	12224	9229	12,419
9 Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	204	107	19	45	23	13	40	18	30	28	58	28	34	28	64 orang
10 Jumlah Balita Stunting	22	115	13 ANAK STUNTING	313	430	385	95	281	122	289	391	278	189	104	136
11 Jumlah Remaja Putri	3096	1824	5189	7,916	6821	3049	23069	3266	7285	19568	-	4943	-	6359	5,852
12 Jumlah Calon Pengantin/Calon Ibu	0	414	12,301	607	NA	353	2406	433	192	486	-	310	42 per des 2022	1316	507
13 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	11090	13187	12,477	36,100	12,273	12,419	37718	11431	22,991	12450	8607	18149	1545	34140 PUS	40,836
14 Jumlah Ibu Hamil	1000	1387	1560	3,687	1338	1206	6636	1468	2446	4498	342	1764	1600	4125	5,332
15 Jumlah Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	158	24	68	460	109	140	834	296	173	442	-	58	125	581	376
16 Jumlah Bayi usia kurang dari 6 bulan	871	306	2340	3,021	576	480	2060	340	699	1100	-	663	711	1666	10,541
17 Jumlah Anak usia 6-23 bulan	1040	1514	0	4,750	1384	1644	6046	2401	5895	2942	-	1867	2086	3980	5,550
18 Jumlah Anak berusia di bawah lima tahun (balita)	3646	5208	4022	12,155	5842	5992	20799	5431	6594	18.201	-	6657	4964	12707	19,641
19 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)	319	100%	3,655	7,563	4902	2,449	8726	3848	0	5378	9535	54.5	33.73	10.383	9.498 KPM
20 Jumlah PAUD	123	181	66	36	225	117	252	103	172	116	220	213	81	264	299

Korwil Koordinasi : Biro Hukum  
 Subbag / Kabag. Perundang-Undangan / ...  
 1 4 3

### Inkubasi Kasus Stunting



Pendampingan keluarga berisiko stunting dilakukan dengan fokus pada masa inkubasi stunting (titik-titik krusial penyebab/terjadinya stunting), dengan fokus pelaksanaan pendampingan pada periode tersebut diharapkan seluruh faktor resiko penyebab stunting bisa teratasi dan berdampak pada penurunan kejadian stunting. Pada masa inkubasi, sasaran perlu difasilitasi untuk memperoleh akses terhadap makanan bergizi, asupan vitamin dan mineral, mengonsumsi keragaman pangan dan sumber protein hewani, layanan kesehatan, sanitasi dan air bersih. Intervensi pendampingan lebih difokuskan kepada calon pengantin/pra nikah/calon PUS, ibu hamil, pasca persalinan dan masa interval serta baduta dan balita meliputi:

Koordinasi : Biro Hukum		
Subag	Kabag. Perundang-Undangan	Kasi
1	4	3

a) Pemeriksaan Kesehatan dan Advokasi KIE Cegah Stunting 3 Bulan Pra Nikah.

Untuk memastikan calon pengantin dalam kondisi sehat, maka diperlukan pemeriksaan dan screening mandiri kesehatan (berat badan, tinggi badan, lingkaran lengan dan kadar hemoglobin darah) 3 bulan sebelum pernikahan secara daring melalui aplikasi pendampingan pranikah yang akan diunduh pada saat pendaftaran calon pengantin. Pemeriksaan dan screening mandiri tersebut akan memberikan sertifikat rekomendasi perbaikan status kesehatan calon pengantin, yang kemudian akan diverifikasi kembali satu bulan sebelum pernikahan melalui pemeriksaan kesehatan calon pengantin di Puskesmas (sebagai salah satu syarat pernikahan). Bagi calon pengantin/calon PUS yang mengalami anemia harus difasilitasi untuk mengonsumsi tablet tambah darah (TTD). Begitu juga bagi mereka yang kekurangan gizi harus difasilitasi kebutuhan gizi yang baik dan seimbang.

Selain perbaikan status kesehatan, advokasi dan KIE pencegahan stunting dan keluarga berkualitas sangat penting dilakukan pada periode ini sebagai fase awal perubahan sikap dan perilaku yang berpotensi terhadap kejadian stunting. Advokasi dan KIE yang dilakukan bersifat interpersonal maupun melalui sebuah sistem informasi berbasis aplikasi bagi pasangan calon pengantin.

b) Pendampingan dan KIE terhadap Ibu hamil

Periode kehamilan merupakan periode kritis kedua yang menentukan terjadinya kasus stunting, oleh karenanya seluruh ibu hamil akan dilakukan pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga pada seluruh periode kehamilannya. Dalam periode kehamilannya Ibu hamil akan memperoleh beberapa assessment (penapisan) untuk memperoleh profil kesehatannya dan menentukan intervensi yang harus dilakukan, baik intervensi gizi sensitif maupun intervensi gizi spesifik selama periode kehamilannya. Dengan demikian, seluruh ibu hamil terfasilitasi kebutuhan kesehatannya, gizinya, pengetahuan tentang stunting, maupun aspek mental dan psikologisnya.

c) Program KB Pascapersalinan

Pada masa pascapersalinan dan interval, perlu segera dilakukan program KB Pascapersalinan. Pada tahap ini perlu segera dilakukan pencegahan kehamilan berikutnya melalui KB Pascapersalinan atau setidaknya dengan Metode Amenore Laktasi (MAL). Mengingat kehamilan dengan jarak yang sangat dekat mempunyai potensi 2 kali lebih besar resiko terjadinya stunting.

Pusat Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag. Perundingan dan	Ka
f	4	3

d) Pendampingan Masa Baduta dan Balita

Pendampingan pada masa baduta dan balita akan difokuskan pada memantau tumbuh kembang anak, fasilitasi akses imunisasi dasar lengkap, serta bantuan sosial bagi keluarga dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memiliki kasus stunting. Disamping itu dilakukan advokasi dan KIE kelompok maupun interpersonal tentang tumbuh kembang anak, pemberian ASI eksklusif untuk anak pada 6 bulan awal dan memberikan makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang bergizi dan seimbang serta kebersihan lingkungan.

e) Fasilitasi Akses Terhadap Bantuan Sosial

Kemiskinan merupakan faktor yang sangat berdampak terhadap munculnya resiko stunting pada keluarga. Dengan asumsi tersebut maka pendampingan keluarga risiko stunting juga dalam kerangka memberikan fasilitasi akses bantuan sosial (kesehatan, pangan dan lainnya) kepada keluarga risiko stunting.

f) Fasilitasi Akses Terhadap Lingkungan dan Rumah Sehat

Kondisi lingkungan yang tidak sehat serta ketiadaan air bersih serta sarana sanitasi sebagai bagian dari ekosistem yang mendorong terjadinya kasus stunting juga harus mendapat perhatian dalam kerangka pendampingan keluarga. Sehingga fasilitasi akses terhadap bantuan rumah sehat, sanitasi dan air bersih juga menjadi tugas yang harus dilakukan oleh pendamping keluarga.

g) Pelaksanaan Dapur Gizi Keluarga berbasis pangan lokal di Desa prioritas Percepatan Penurunan Stunting

Keberadaan dapur gizi keluarga khususnya di desa-desa prioritas diharapkan dapat membantu dalam pemenuhan gizi yang sehat dan seimbang bagi keluarga berisiko stunting di wilayah sekitarnya. Untuk terselenggaranya dapur gizi keluarga berbasis pangan lokal dapat dilakukan melalui dukungan warga sekitar dengan cara iuran atau gotong royong, bantuan pemerintah, atau pemerintah daerah, pemangku kepentingan atau perusahaan melalui CSR atau bantuan lain yang tidak mengikat dan sesuai dengan peraturan perundangan. Dapur gizi keluarga berbasis pangan lokal dapat dilaksanakan di rumah kepala desa, atau ketua RW oleh TP. PKK Desa/RW beserta Tim Pendamping Keluarga.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag. Peningkatan Un. Jangan	Kabo
f	g	h

#### E. Audit Kasus Stunting

Audit kasus stunting merupakan upaya identifikasi risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran berbasis surveilans rutin atau sumber data lainnya, khususnya sebagai penapisan kasus-kasus yang sulit termasuk mengatasi masalah mendasar pada kelompok sasaran audit berisiko stunting, yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui/nifas dan baduta/balita. Aksi audit kasus stunting dilakukan dalam kerangka untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut dengan permasalahan sistem pelayanan kesehatan, manajemen pendampingan keluarga maupun yang berhubungan dengan medical problem (permasalahan medis) terkait kasus stunting. Pada area sistem pelayanan kesehatan dan manajemen pendampingan keluarga audit stunting dilakukan secara berjenjang dan berlapis. Masalah dan kendala yang dihadapi di tingkat desa/kelurahan ke bawah dilakukan audit kasus melalui "rembuk stunting". Jika masalahnya belum dapat dituntaskan, akan dibahas di tingkat kecamatan melalui minilok. Jika masalahnya belum terpecahkan akan dibahas melalui rembuk stunting di kabupaten/kota. Sedangkan berlapis maksudnya adalah petugas berdasarkan keilmuannya yaitu mulai dari bidan sampai dokter umum atau dokter spesialis dan mulai dari kader sampai ahli gizi.

Dalam setiap tahap audit kasus yang menyangkut sistem pelayanan kesehatan dan manajemen pendampingan keluarga, audit stunting dilakukan dengan berbagai lapisan masyarakat dengan latar belakang pengalaman dan keilmuan (Bidan Desa, PKB, Kader, Tokoh Masyarakat, Tokoh agama, Kepala Desa/Lurah, Camat, Dokter dan Kepala Puskesmas, Perawat, Ahli gizi, Dokter Sp.A, Kepala Dinas terkait di tingkat kab/kota). Dengan demikian, diharapkan berbagai masalah dapat diselesaikan secara komprehensif pada setiap tahapan.

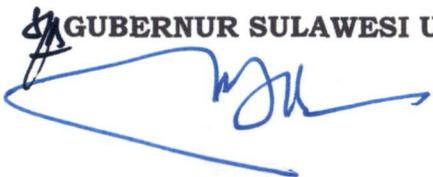
Sedangkan dalam pemecahan masalah terkait medical problem (permasalahan medis) lebih difokuskan kepada kejadian-kejadian luar biasa, pemeriksaan holistik kasus stunting (dengan asumsi bahwa pendampingan sudah dilaksanakan, namun kasus stunting tetap terjadi) sehingga ditemukan referensi dan inovasi pemecahan masalah untuk perbaikan pola penanganan kasus Stunting ke depan. Pelaksanaan audit kasus stunting yang berhubungan dengan medical problem dilakukan satu tahun sekali oleh tim panel ahli audit kasus stunting di tingkat kabupaten/kota.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesrbag	Kabag. Perundang-Undangan	Kes
f	e	g

#### F. Pembinaan dan Pengawasan

Sebagai implementasi Keputusan Gubernur Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2024, bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan mengapresiasi kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting di Sulawesi Utara, maka Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah melaksanakan Penilaian Kinerja bagi Kabupaten/Kota di wilayahnya dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk menilai aspek kinerja apa saja yang sudah baik atau yang masih perlu ditingkatkan di setiap kabupaten dan kota;
- 2) Untuk mengetahui hal inspiratif, replikatif dan inovatif dalam pelaksanaan konvergensi penurunan stunting;
- 3) Untuk memfasilitasi sharing pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan 8 aksi konvergensi; dan
- 4) Untuk mengapresiasi kinerja kabupaten/kota atas upaya percepatan penurunan stunting di Sulawesi utara.

  
**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**  
**OLLY DONDOKAMBEY**

#### F. Pembinaan dan Pengawasan

Sebagai implementasi Keputusan Gubernur Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2024, bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan mengapresiasi kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting di Sulawesi Utara, maka Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah melaksanakan Penilaian Kinerja bagi Kabupaten/Kota di wilayahnya dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk menilai aspek kinerja apa saja yang sudah baik atau yang masih perlu ditingkatkan di setiap kabupaten dan kota;
- 2) Untuk mengetahui hal inspiratif, replikatif dan inovatif dalam pelaksanaan konvergensi penurunan stunting;
- 3) Untuk memfasilitasi sharing pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan 8 aksi konvergensi; dan
- 4) Untuk mengapresiasi kinerja kabupaten/kota atas upaya percepatan penurunan stunting di Sulawesi utara.

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**



**OLLY DONDOKAMBEY**